Volume 2 No. 4 | Agustus 2025

WARTA ISEI

ISSN 3048-0574

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

PENDIDIKAN MEMBUMI

Kurva Pembelajaran, Kualitas SDM dan Akreditisasi AACSB
Ari Kuncoro

Peran LAMEMBA dalam Akreditasi Prodi Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Indonesia
Ina Primiana

Mendorong SDM Unggul di Perdesaan
Mulyanto

Membangun Pendidikan Indonesia yang Lebih Baik: **Pelajaran dari Nobel Ekonomi 2019**
Yohanes Berenika Kadarusman

Urgensi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bankir
Reinhard Harianja

Menciptakan Pendidikan Unggul
Robert Larson Nehe

Beyond Skills: **X-Talent Karakter untuk Pemimpin Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045**
Elfindri dan Ofanto

Ilmuwan Sebagai Lentera Kemajuan Bangsa
Firman Sihol Parningotan

Pendidikan Unggulan dan Profesi di Indonesia: **Menyiapkan Generasi Unggul di Era AI**
Aldrin Herwany

LPK dan LSP: **Pilar Kompetensi Tenaga Kerja di Tengah Dinamika Industri 4.0**
NS. Aji Martono

ppisei_official PP ISEI isei.or.id

WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

PENERBIT
Bidang Pengembangan Akademik & Riset Pengurus Pusat ISEI

Pemimpin Umum
Perry Warjiyo

Penanggung Jawab
Solikin M. Juhro

Ketua Dewan Redaksi
Hermanto Siregar

Dewan Editor Ahli
Christantius Dwiatmadja
Suharnomo
Jaka Sriyana
Yohanes B. Kadarusman
M.Firdaus
Sahara

Manajemen Redaksi
Anika Faisal
Lisawati
Aviliani
Yoga Affandi
Antonius Widodo

Redaktur Pelaksana
Firman Sihol Parningotan

Wakil Redaktur Pelaksana
Jonathan Ersten Herawan

Keuangan
Efrilia Sukmagraha

Desain dan Layout
Najmah Faisal
Fabritio Paulus Kumowal

Kantor Redaksi
Achmad Kusnadi
Nuni Purwahyuni
Suswanto
Rudi Rianto

Disclaimer:
Opini, laporan dan informasi yang dimuat dalam majalah ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Warta ISEI.

ISEI MENYAPA

Sambutan Dewan Editor Ahli Warta ISEI 01

OPINI

Kurva Pembelajaran, Kualitas SDM dan Akreditisasi AACSB 03
Prof. Dr. Ari Kuncoro

Peran LAMEMBA dalam Akreditasi Prodi Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Indonesia 06
Prof. Dr. Ina Primiana

Ilmuwan Sebagai Lentera Kemajuan Bangsa 08
Firman Sihol Parningotan, M.Ec.

Mendorong SDM Unggul di Pedesaan 10
Dr. Mulyanto, M.E.

Membangun Pendidikan Indonesia yang Lebih Baik: **Pelajaran dari Nobel Ekonomi 2019** 12
Yohanes Berenika Kadarusman, Ph.D.

Beyond Skills: **X-Talent Karakter untuk Pemimpin Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045** 13
Elfindri dan Ofanto

Mengejar Pendidikan Unggul: **Mengukur Tepat Sasaran Dana Pendidikan** 16
Jonathan Ersten Herawan

Pendidikan Unggulan dan Profesi di Indonesia: **Menyiapkan Generasi Unggul di Era AI** 18
Aldrin Herwany, Ph.D.

LPK dan LSP Pilar Kompetensi Tenaga Kerja di Tengah Dinamika Industri 4.0 19
NS. Aji Martono

Urgensi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bankir 21
Ir. Reinhard Harianja, MM, SCO, CCM, CACP

Menciptakan Pendidikan Unggul 23
Robert Larson Nehe

SINOPSIS BUKU

PELAJARAN BAIK Dari Pendidikan Tinggi Malaysia 24
Prof. Dr. Muhammad Firdaus

KEGIATAN ISEI

Soemitronomics 2025: Mewujudkan Ekonomi Indonesia yang Tangguh dan Inklusif di Sulawesi Utara 26

Universitas Sebelas Maret (UNS): Mangesthi Luhur Ambangun Nagara – Advancing Human Society, Preserving Noble Values 27

Pengurus ISEI Cabang Medan Resmi Dilantik 28

Pelantikan ISEI Manado: Menyongsong Sidang Pleno XXIV dan Seminar Nasional ISEI 2025 29

Pelantikan ISEI Bandung 30

ISEI MENYAPA

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia." – Nelson Mandela.

Kalimat singkat ini terasa begitu kuat. Ia mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar urusan bangku sekolah, ujian, atau deretan gelar, melainkan jalan panjang untuk membangun peradaban. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, juga pernah menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka bisa hidup selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan selalu menjadi lokomotif peradaban dan tulang punggung pembangunan ekonomi. Tema Warta ISEI Edisi Agustus 2025 "Pendidikan Membumi" dapat menjadi inspirasi untuk membahas tentang pentingnya pendidikan dalam berbagai jenjang dan profesi yang relevan, efektif, dan berdampak pada masyarakat.

Ki Hajar mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak boleh tercerabut dari masyarakat. Pendidikan sejatinya adalah bagian dari kebudayaan—usaha untuk menumbuhkan budi pekerti, melatih pikiran, sekaligus menguatkan jasmani. Karena itu, pendidikan seharusnya membantu anak tumbuh utuh: cerdas akalnya, halus budinya, kuat raganya, dan peka terhadap lingkungannya.

Namun, realitas di lapangan masih jauh dari cita-cita itu. Jurang kesenjangan antarwilayah masih terasa. Di kota besar, sekolah-sekolah penuh fasilitas modern: laboratorium lengkap, internet cepat, hingga ruang kelas nyaman. Sementara di pedalaman, ada sekolah yang bahkan kekurangan guru, apalagi fasilitas. Sistem pendidikan kita juga masih sering menekankan hafalan dan ujian, sehingga anak-anak terjebak dalam rutinitas angka tanpa banyak ruang untuk berkreasi, berempati, atau berpikir kritis.

Di sisi lain, teknologi dan globalisasi memberi peluang besar, tapi juga ancaman. Anak-anak sekarang bisa belajar apa saja lewat gawai, dari sains hingga seni. Tetapi jika pendidikan tidak ditopang dengan karakter yang kuat, mereka bisa terasing dari budaya sendiri.

Banyak negara punya pengalaman berharga yang bisa kita pelajari. Finlandia, misalnya, menekankan kesetaraan dan memberi kepercayaan besar pada guru. Jepang menanamkan disiplin dan kebersamaan sejak usia dini. Singapura mengaitkan pendidikan dengan arah pembangunan ekonominya. Indonesia tentu tidak bisa menyalin mentah-mentah, tapi semangatnya bisa diambil. Kita memiliki modal besar: budaya yang kaya, semangat gotong royong, serta kearifan lokal yang jika dikawinkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, akan melahirkan pendidikan dengan identitas khas—membumi, tapi tetap berdaya saing global.

Menjelang satu abad kemerdekaan pada 2045, cita-cita "Indonesia Emas" hanya bisa diwujudkan bila pendidikan ditempatkan sebagai prioritas. Generasi emas yang kita harapkan adalah generasi yang sehat, berkarakter, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Pendidikan harus inklusif, memastikan tak ada anak yang tertinggal. Ia juga harus menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta semangat gotong royong. Pendidikan yang adaptif dan inovatif akan melahirkan generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis lingkungan hingga revolusi teknologi.

Dalam perjalanan ini, perguruan tinggi punya peran penting. Kampus seharusnya tidak hanya menjadi "pabrik gelar", tetapi juga laboratorium kehidupan. Di sana ilmu bertemu dengan persoalan nyata masyarakat. Melalui riset dan pengabdian, perguruan tinggi bisa melahirkan solusi: teknologi sederhana untuk petani, inovasi energi ramah lingkungan, atau model kewirausahaan sosial yang memberdayakan desa. Kampus juga harus menjadi ruang dialog antara tradisi dan modernitas, agar anak-anak bangsa yang berpendidikan tinggi tetap berakar pada nilai kebangsaan.
Ke depan, ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh agar pendidikan semakin membumi:

1. Pemerataan kualitas pendidikan – memastikan akses yang adil untuk semua anak, tanpa terkecuali.
2. Mengubah paradigma pembelajaran – dari hafalan menuju proses kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah.
3. Memperkuat pendidikan karakter – agar generasi muda tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan peduli sosial.

4. Menghubungkan pendidikan dengan kehidupan nyata – termasuk dunia kerja, riset, dan pembangunan masyarakat.
5. Membangun kesinambungan sistem – dari pendidikan dasar hingga tinggi, sebagai sebuah ekosistem yang utuh.

Ki Hajar Dewantara pernah berpesan: pendidikan itu menuntun, bukan menyeragamkan; membebaskan, bukan membatasi. Pesan ini tetap relevan hingga hari ini. Pendidikan yang membumi adalah pendidikan yang memberi ruang bagi anak untuk tumbuh sesuai kodratnya, namun juga menanamkan nilai-nilai agar mereka siap menghadapi dunia.

Tentu jalan menuju cita-cita ini tidak mudah. Masih ada keterbatasan fasilitas, kesenjangan mutu, birokrasi yang lambat, hingga tantangan global yang terus berubah. Namun justru di tengah segala keterbatasan itu semangat harus terus dijaga. Dengan keyakinan, kerja sama, dan tekad yang kuat, pendidikan Indonesia bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan membanggakan.

Pada akhirnya, pendidikan yang membumi adalah bekal terpenting agar Indonesia mampu melangkah maju dengan kepala tegak—berakar kuat pada tanahnya, namun siap menatap dunia dengan percaya diri.

Selamat Membaca

Prof. Christantius Dwiatmadja
Dewan Editor Ahli Warta ISEI

BCA
GRUP BCA
Senantiasa di Sisi Anda
myBCA
Poket Valas
USD
SGD
JPY
EUR
GBP
HKD
AUD
CNY
MYR
THB
CHF
CAD
DKK
NZD
SEK
SAR
Beranda
Riwayat
QRIS
Notifikasi
Akun Saya
TRANSAKSI
DI LUAR NEGERI
DENGAN POKET VALAS DI
my BCA
16 MATA UANG ASING
DEBIT/TARIK TUNAI TANPA KONVERSI KURS
TOP UP VALAS 24/7
AKTIFKAN SEKARANG
bca.id/poket
BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia • BCA merupakan peserta penjaminan LPS • bca.co.id
#NYAMANNYAMENDUNIA

Opini

Kurva Pembelajaran, Kualitas SDM dan Akreditisasi AACSB

Oleh **Prof. Dr. Ari Kuncoro**
Guru Besar FEB UI & Wakil Ketua PP ISEI Bidang II

Satu kalimat bijak mengatakan beradaptasi atau punah. Kalimat ini merupakan suatu metafora yang cocok untuk dunia usaha bahwa untuk dapat bertahan maka beradaptasi mutlak dilakukan karena lingkungan yang selalu berubah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) merupakan satu fakultas di Universitas Indonesia (UI) yang menaungi pendidikan ekonomi dan bisnis (manajemen dan akuntansi). Sama seperti dunia bisnis lingkungan pendidikan tinggi berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu strategi untuk dapat memitigasi perubahan ini adalah dengan menggunakan teori disrupsi. Dalam hal ini agen disrupsi atau disruptor adalah lembaga akreditisasi international yang untuk pendidikan ekonomi dan bisnis adalah AACSB (*Association to Advance Collegiate School of Business*). Artikel ini merupakan upaya berbagi pengalaman dari mengikuti akreditisasi sampai memperoleh sertifikasi AACSB.

Pendekatan Disrupsi dan Keseimbangan

AACSB dapat disebut sebagai disruptor karena AACSB lebih seperti mitra latih (*sparing partner*) yang memacu pendidikan tinggi untuk bertransformasi sesuai dengan tuntutan jaman. Harus diakui memang bukan suatu investasi yang murah. Namun hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan organisasi perguruan tinggi untuk mampu berparsipasi di dunia pendidikan tinggi global sebagai jembatan bagi universitas di Indoneisa. Dengan harapan membawa ide-ide baru ke dalam negeri untuk dapat dijadikan modal sosial bagi perkembangan ilmu dan peningkatan kesejahteraan pada umumnya.

Perkembangan tata kelola pendidikan tinggi sekarang ini merupakan suatu evolusi dan bukan perubahan mendadak. Dimulai dari tradisi pendidikan tinggi sebagai insititusi pembelajaran (*teaching university*) yang menghimpun melestarikan pengetahuan dari generasi melalui pengajaran dan kepustakaan. Selanjutnya pada permulaan abad 20 setelah revolusi industri pertama di Inggris penemuan dan inovasi mulai menjadi marak untuk meningkatkan

teknologi yang memudahkan kegiatan masyarakat sehari-hari. Pada mulanya penemuan baru (*invention*) dilakukan riset oleh individu di ruang bawah rumah (*basement*) atau garasi tempatnya tinggal. Dalam perkembangan selanjutnya cara seperti ini dirasakan tidak lagi memadai ketika perkembangan teknologi secara terjadi makin cepat secara eksponensial. Untuk itu riset tidak lagi dilakukan oleh perseorangan namun dilakukan di lembaga riset. Hal ini kemudian berkembang lagi setelah perguruan tinggi menjadi rumah bagi lembaga riset.

Istilah transformasi ekonomi merujuk pada sumber pertumbuhan baru yang berasal dari akumulasi stok ilmu pengetahuan, yang ditansformasikan menjadi inovasi teknologi baru melalui penelitian dan pengembangan (R&D) serta belajar sambil bekerja (*learning by doing*). Ide ini dicanangkan pertama kalinya oleh Romer (1990), yang memodifikasikan teori pertumbuhan Solow (1956). Model Solow mengandalkan modal fisik (*physical capital*) sama seperti faktor produksi lainnya memiliki sifat produktivitas marginal yang menurun atau *diminishing marginal productivity* dengan bertambahnya stok kapital. Dengan adanya mesin baru ini maka peluang negara-negara berkembang atau *emerging* untuk dapat memperkecil jurang dengan negara-negara yang telebih dahulu sudah lebih maju (*catching-up*) menjadi lebih besar.

Terminologi memperkecil jurang tersirat dalam prinsip perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) yang dianut AACSB. Filosofi ini sangat penting bagi pendidikan tinggi di negera-negara seperti Indonesia. Yang diperlukan bukan lompatan jauh ke depan, namun usaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Universitas-universitas bereputasi di Indonesia mendapatkan tugas untuk meningkatkan keterpaparan Indonesia ke dunia internasional untuk mempelajari ilmu dan teknologi melalui kemitraan. Tugas ini akan sangat mahal dari segi waktu dan biaya jika harus dilakukan sendiri-sendiri. Untuk itu dilakukan kolaborasi yang sebenarnya meminjam prinsip skala ekonomi di luar unit atau *economic scale external to the unit* yang timbul karena kerjasama. AACSB bukan tujuan akan tetapi adalah instrumen kolaborasi dan memanjat kurva pembelanjaran (*learning curve*). Selain itu juga merupakan patok ukur (*benchmark*) standar kinerja universitas yang harus dipenuhi. Kolaborasi adalah masalah budaya yang merupakan ranah softskill karena melibatkan dua organisasi yang mungkin berbeda kultur organisasinya. Dalam hal ini, AACSB melalui interaksi dengan mentor, asesor dan perguruan tinggi lain dalam konferensi internasional merupakan tempat memanjat kurva pembelajaran sembari membangun kerjasama antar universitas.

Proses Akreditisasi

Selain kualitas SDM fakultas atau sekolah, dalam implementasi akreditisasinya AACSB menekankan pada keseimbangan antara pengembangan ilmu dan hilirasi ilmu ke terapan. Kata yang digunakan adalah relevansi yang sebenarnya senapas dengan motto Tridarma Pendidikan Tinggi, yang merupakan keseimbangan antara pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, Kata seimbang tidak harus diartikan sebagai bobot yang sama untuk ketiganya. Namun lebih merupakan kearifan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat di masing-masing negara. **Tabel 1** memperlihatkan keseimbangan yang harus dipenuhi suatu unit yang akan diakreditasi. Pada dasarnya ilmu tidak saja hanya untuk menciptakan pengetahuan baru atau hanya sebagai menara gading. Namun pendidikan juga harus melakukan hilirisasi ilmu pengetahuan sehingga membawa manfaat bagi masyarakat. Logikanya adalah masyarakat juga secara langsung melalui uang kuliah dan tidak langsung melalui pajak turut serta dalam membiayai pendidikan tinggi, sehingga sudah sepatutya pendidikan tinggi memberikan kontribusi balas budi (*giving back*).

Proses akreditisasi dimulai dengan mengirimkan surat permintaan ke AACSB untuk melakukan evaluasi awal apakah suatu entitas pendidikan tinggi yang bersangkutan memenuhi kelayakan (*eligible*) dari segi kualitas SDM maupun program dan rencana pengembangan organisasi berdasarkan potret data terkini. Tujuannya pertama adalah untuk melihat komposisi keseimbangan SDM staf pengajar **(Tabel 1)**. Kriteria utama yang dinilai adalah komposisi staf pengajar yang dikategorikan sebagai akademisi ilmu pengetahuan (*scholarly academic* atau SA) yang bergelar doktor, akademisi yang juga praktisi (*practice academic* atau PA), praktisi yang terlibat kegiatan akademik misalnya ilmuwan dari laboratorium industri (*scholarly practioner* atau SP) dan instruktur pembelajaran yang berasal dari dunia praktek atau industri (*instructor practioner* atau IP). Syarat kecukupan pengajar yang bergelar doktor diperlukan untuk menjamin universitas melakukan penelitian. Komposisi minimum untuk SA adalah 40 persen. Sementara itu jumlah SA, PA, SP dan IP minimum harus mencapai 90 persen yang bertujuan memperkuat misi pembelajaran dan penelitian agar mempunyai dampak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas SDM lulusannya. SA dan PA harus dapat menunjukan keterlibatannya sebagai akademisi dengan publikasi di jurnal ilmiah. Pekerjaan rumah terberat adalah meningkatkan komposisi SA dan

Tabel 1. Prinsip keseimbangan AACSB

<table>
<tr><th colspan="4">Dampak kemasyarakatan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengajaran</td><td>Profesi</td><td>Pengetahuan Ekonomi</td><td rowspan="2">Penelitian</td></tr>
<tr><td>Ilmu sosial</td><td>Ekonomi dan Bisnis</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dampak keilmuan</td></tr>
</table>

Sumber: AACSB Guiding Principles

Tabel 2: Prinsip dan standar Akreditisasi AACSB

Manajemen strategis dan inovasi	Kesuksesan pembelajar	Kepemimpinan, keterlibatan dan dampak sosial
1. Rencana strategis	4. Kurikulum	8. Dampak keilmuan
2. Sumber daya fisik, keuangan dan virtual	5. Jaminan pembelanjaran (*assurance of learning*)	9. Keterlibatan dan dampak sosial
3. Sumber daya staf pengajar dan instruktur profesional	6. Kemajuan pembelajar	
7. Efektivitas dan dampak pengajaran		

Sumber: AACSB Guiding Principles

atau meningkatkan kombinasi proporsi SA, PA, SP plus IP sampai mencapai batas minium. Sedikit banyak kegagalan suatu entitas pendidikan tinggi untuk memperoleh sertifikasi AACSB terjadi karena gagal mencapai persyaratan ini dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berikutnya, suatu organisasi pendidikan tinggi juga harus mempunyai dokumen atau catatan yang memuat apa yang sudah dilakukan termasuk strategi jangka panjang. AACSB kemudian melakukan *gap analysis* apakah dalam batas waktu maksimum akreditasi organisasi tersebut dapat melakukan perbaikan, mengisi celah kekurangan yang ada, atau setidak-tidaknya menunjukan kebijakan yang sudah diambil di masa lalu untuk menuju perbaikan yang rinciannya dapat dilihat di **Tabel 2**. Jika ternyata organisasi tersebut dinilai mampu untuk memperbaiki diri dalam kurun waktu 7 tahun maka surat kelayakan untuk diakreditasi akan dikeluarkan. Jika dinilai belum layak maka universitas dipersilahkan untuk memperbaiki diri dan mengajukan surat permintaan akreditasi di lain waktu. Di sini unit pendidikan tinggi mempunyai opsi untuk bergabung sebagai anggota (*membership*) tanpa harus memiliki sertifikat *ACCSB accredited,* yang memungkinkannya untuk turut serta dalam berbagai kegiatan konferensi nasional dan internasional untuk peningkatan kapasitas. Ini merupakan fleksiibilitas ala AACSB yang memungkinkan suatu organisasi yang karena berbagai faktor memutuskan tidak akan ikut akreditisasi namun membutuhkan pembelajaran dari AACSB untuk dapat memperbaiki mutu.

Setelah dinyatakan *eligible*, tahap pertama adalah laporan awal evaluasi diri atau *initial self-evaluation report* (ISER) yang merupakan pendalaman dari yang sudah dikemukakan dalam surat permintaan akreditisasi dan juga memberikan respons atas masukan awal dari AACSB untuk perbaikan. Dengan pekerjaan rumah seperti di atas waktu untuk untuk mendapatkan sertifikat AACSB *accredited* seringkali mencapai batas maksimum 7 tahun. Jika rentang waktu ini habis tanpa ada kemajuan yang berarti proses akreditisasi akan dihentikan. Insititusi yang bersangkutan ingin tetap mempunyai opsi untuk mengajukan permohonan baru di waktu yang akan datang.

Peran ISEI dan LAMEMBA

Kolaborasi antar universitas merupakan kunci dalam memanjat kurva pembelajaran. Keterakreditisasian AACSB merupakan sinyal untuk berkolaborasi. Namun dengan sangat bervariasinya pencapaian akademis berbagai universitas di Indonesia, akan terlalu mahal untuk secara sendiri-sendiri dapat memperoleh akreditisasi AACSB. Di sinilah relevansi dari Lembaga Akreditisisasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntasi (LAMEMBA) yang merupakan lembaga yang berada dalam naungan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan (NKB) bersama antara LAMEMBA dan AACSB maka LAMEMBA dapat merupakan jembatan untuk pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis di Indonesia untuk beradaptasi sesaui dengan tuntutan jaman.

Sebagai *branding* dari organisasi akreditisasi AACSB mempunyai sifat saling memperkuat antara universitas dan fakultas. Bukan rahasia lagi bahwa universitas di luar negeri dalam mencari mitra kerjasamanya dengan selektif. Keterakreditisasian ACCSB merupakan salah satu sinyal yang diilihat perguruan tinggi di luar negeri dalam mencari potensi mitranya. Fakta menunjukan bahwa beberapa perguruan tinggi berbadan hukum seperti UI, UGM dan ITB yang mempunyai fakultas atau sekolah ekonomi dan bisnis yang terakreditisasi AACSB mempunyai peringkat internasional versi QS (*Quackquarelly Symonds*) dan THE (*Times Higher Education*) yang cukup terhormat.

Namun tidak itu saja, akreditasi sembari belajar dan bekerja adalah manfaat utama dari proses akreditisasi AACSB. Untuk dapat melakukan melalui kolaborasi penelitian, pertukaran staf pengajar (*inbound* dan *outbound*) maupun mobilitas mahasiswa antar perguruan tinggi. Bergabung dengan kluster universitas terkemuka di luar negeri bukanlah suatu yang mudah karena mereka pada dasarnya mereka prasyarat tertentu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan budaya dan kemampuan seperti bernegosiasi, berpikir pada tataran yang lebih tinggi (*higher order of thinking*), menghubungkan fakta-fakta (*connecting the dots)*, kemampuan bertutur (*story telling*) dan kemampuan beradaptasi pada umumnya tidak tertulis. Namun sangat diperlukan untuk dapat menjadi bagian dari jejaring tersebut, karena pada akhirnya hubungan antar manusialah yang menjadi kunci. Pembicaraan menuju implementasi kerjasama memerlukan kimiawi yang tepat antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu pengetahuan budaya setempat misalnya sejarah, film, kuliner dan lainnya sangat berguna untuk membina keguyuban, tidak sekedar hanya hubungan formal antar organisasi.

Bentuk kecakapan sosial seperti inilah yang akan merealisasikan kerjasama penelitian jangka panjang untuk topik-topik dengan tingkat kebaharuan yang ikonik yang dapat dijadikan bendera oleh universitas-universitas yang terlibat. Penelitian sudah berkembang ke arah pencarian bahan substitusi tanah langka (*rare earth materials*) dan efisiensi penggunaannya dengan konsep reduksi dan daur ulang yang diperlukan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Dengan tujuan agar transisi energi dari bahan bakar fosil ke EBT dari penambangan, pengolahan produk sampai barang akhir untuk konsumsi tetap ramah lingkungan. Ini akan merupakan transformasi ekonomi gaya baru dan sumber pertumbuhan di masa depan.

Opini

Peran LAMEMBA dalam Akreditasi Prodi Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Indonesia

Oleh **Prof. Dr. Ina Primiana**
Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA/ Pengurus Pusat ISEI Bidang V

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara aktif, yang berguna bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Dalam era kemajuan teknologi perguruan tinggi dituntut untuk beradaptasi, kualitas pendidikan menjadi faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pendidikan ilmu EMBA adalah sistem akreditasi Program Studi. Selain itu, sistem akreditasi diharapkan akan mendorong perguruan tinggi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Penataan sistem akreditasi yang lebih baik dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel Lembaga Akreditasi Mandiri, yang disingkat LAM, didirikan untuk memenuhi amanah UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 55 ayat 4 UU No 12 Tahun 2012 menyatakan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi atau yang selanjutnya disebut LAMEMBA, merupakan LAM berbadan hukum dari rumpun ilmu sosial ekonomika dan rumpun ilmu terapan akuntansi dan bisnis, yang terdiri dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA). LAMEMBA berdiri pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan usulan pendirian yang telah disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor T/498/M/OT.00.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas rekomendasi dari BAN-PT yang tertuang pada surat nomor 300/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019. LAMEMBA diprakarsai oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi dalam bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

LAMEMBA hadir sebagai salah satu solusi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi dan program studi secara lebih konsisten, otonom, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. LAMEMBA berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas, mendorong inovasi, serta memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Instrumen yang dikembangkan oleh LAMEMBA disesuaikan dengan kompetensi bidang keilmuan EMBA dan juga disesuaikan dengan tuntutan DUDIKA, hal ini akan meningkatkan daya saing lulusan. Selain itu, kurikulum yang disusun berdasarkan masukan dari DUDIKA membuat lulusan lebih siap memasuki pasar kerja. Pada instrument LAMEMBA, Perguruan tinggi didorong untuk memfasilitasi mahasiswa mengikuti program untuk meningkatkan kompetensi lulusan antara lain *student mobility, exchange student,* adanya *visiting lecturer, company visit,* magang atau praktik langsung di perusahaan mitra, sehingga lulusan tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki pengalaman praktek.

Tahun 2012 adalah tahun LAMEMBA mulai melaksanakan proses akreditasi untuk program studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Sejak tahun 2022 LAMEMBA telah menjalankan proses akreditasi sebanyak 2530 Program Studi

dengan mayoritas PTS sebesar 69,53%. Adapun distribusi terbanyak adalah peringkat Baik Sekali (47%) diikuti oleh Baik (33,40%) dan selanjutnya Unggul (19,6%). Perhatikan gambar 1 berikut:

Masuknya LAMEMBA ke jejaring internasional diharapkan kedepan sangat bermanfaat bagi Program studi yang sudah diakreditasi LAMEMBA antara lain lulusan lebih mudah diakui akan dianggap lebih kompeten karena telah di rekognisi internasional atau berkolaborasi dengan Lembaga akreditasi internasional.

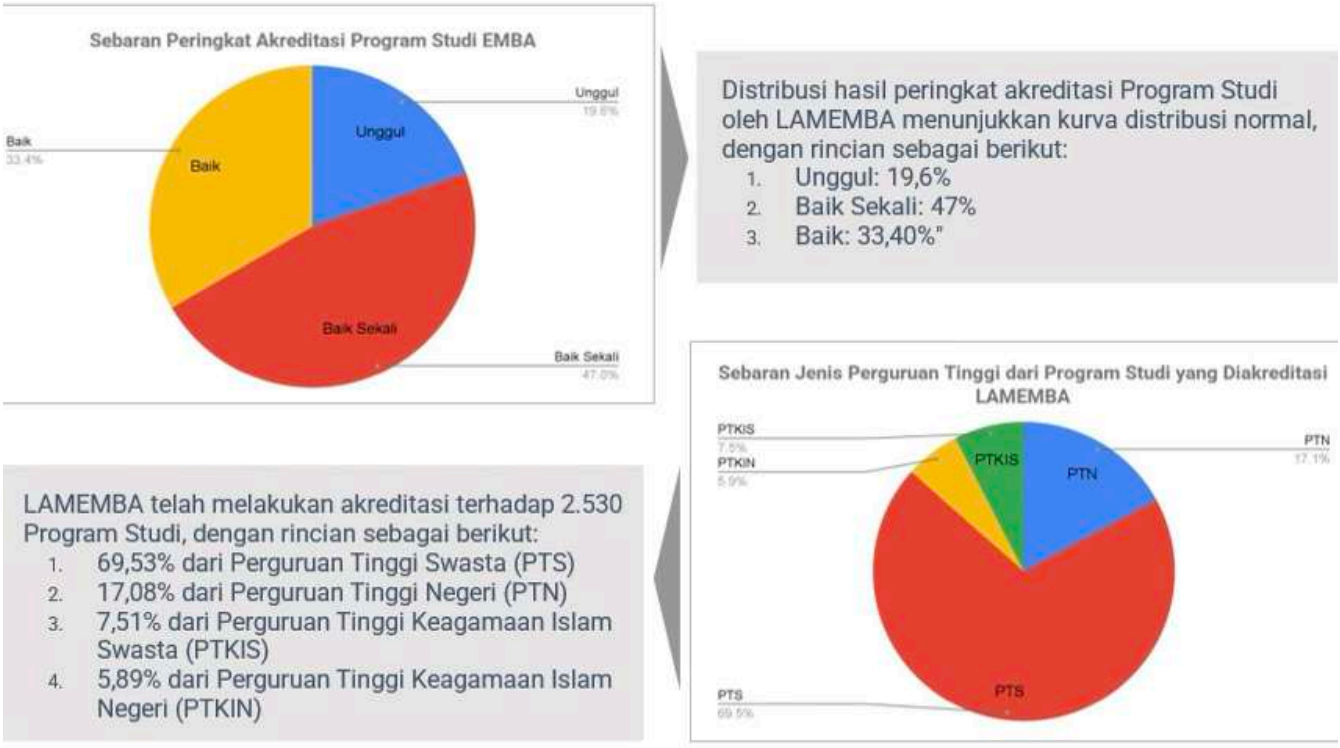

Gambar 1. Sebaran Peringkat Akreditasi

LAMEMBA memiliki visi ingin menjadi lembaga akreditasi Program Studi bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang bereputasi dan diakui secara Nasional dan Internasional. Pada tahun 2025 LAMEMBA telah memiliki rekognisi internasional yaitu adanya MOU dengan Lembaga Akreditasi Internasional AACSB sejak tahun 2022 hingga saat ini dan *alignment* dari INQAAHE (Asosiasi lembaga akreditasi internasional tingkat dunia). Setiap event AACSB, LAMEMBA selalu diundang sebagai mitra yang pelaksanaannya baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Seluruh asesor LAMEMBA telah mengikuti program pelatihan dari AACSB. LAMEMBA saat ini menunggu hasil dari INQAAHE untuk menjadi lembaga akreditasi internasional, review awal tim panel yang berasal dari Malaysia, Bahrain dan UK, dari 6 standar dengan penilaian diantara 1-4, 1 standar dinilai *fully complaint* yaitu nilai 4 (100% tercapai) dan 5 standar lainnya dinilai *substantially* yaitu nilai 3 (75% tercapai).

oleh perusahaan internasional, multi-nasional atau perguruan tinggi luar negeri bila akan studi lanjut. Selain itu, kerja sama antar universitas, pertukaran pelajar, dan program *double degree* juga lebih mudah dilakukan jika LAMEMBA telah direkognisi oleh asosiasi lembaga akreditasi internasional. Dengan selalu mengikuti berbagai *event* internasional untuk memperluas jejaring dan kolaborasi maka LAMEMBA sangat berperan dalam meningkatan kualitas Pendidikan tinggi di Indonesia. LAMEMBA di tahun 2026 diharapkan sudah dapat menjadi Lembaga akreditasi internasional, yang akan melakukan proses akreditasi selain di dalam negeri juga di luar negeri. Untuk 5 tahun pertama LAMEMBA akan fokus di negara-negara di ASEAN.

Hal ini tentunya akan membangun kepercayaan masyarakat, termasuk calon mahasiswa, orang tua, dan industri, terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan. Misalnya, sebuah program studi yang terakreditasi oleh LAMEMBA, lulusannya LAMEMBA berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada Prodi, meningkatkan pemahaman melalui edukasi yang intensif, serta membangun kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam aspek internal, efisiensi dan efektivitas proses akreditasi terus ditingkatkan melalui tata kelola organisasi berbasis mutu dan penguatan sistem etika dan kepatuhan.

Dari uraian diatas, LAMEMBA memainkan peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkuat daya saing lulusan, dan mendorong inovasi bidang EMBA dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Dengan sistem yang lebih terukur dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, LAMEMBA tidak hanya membantu perguruan tinggi mencapai standar nasional tetapi juga mempersiapkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Opini

Ilmuwan Sebagai Lentera Kemajuan Bangsa

Oleh **Firman Sihol Parningotan, M.Ec.**
Dosen Perbanas Institute & Sekretaris Eksekutif PP ISEI

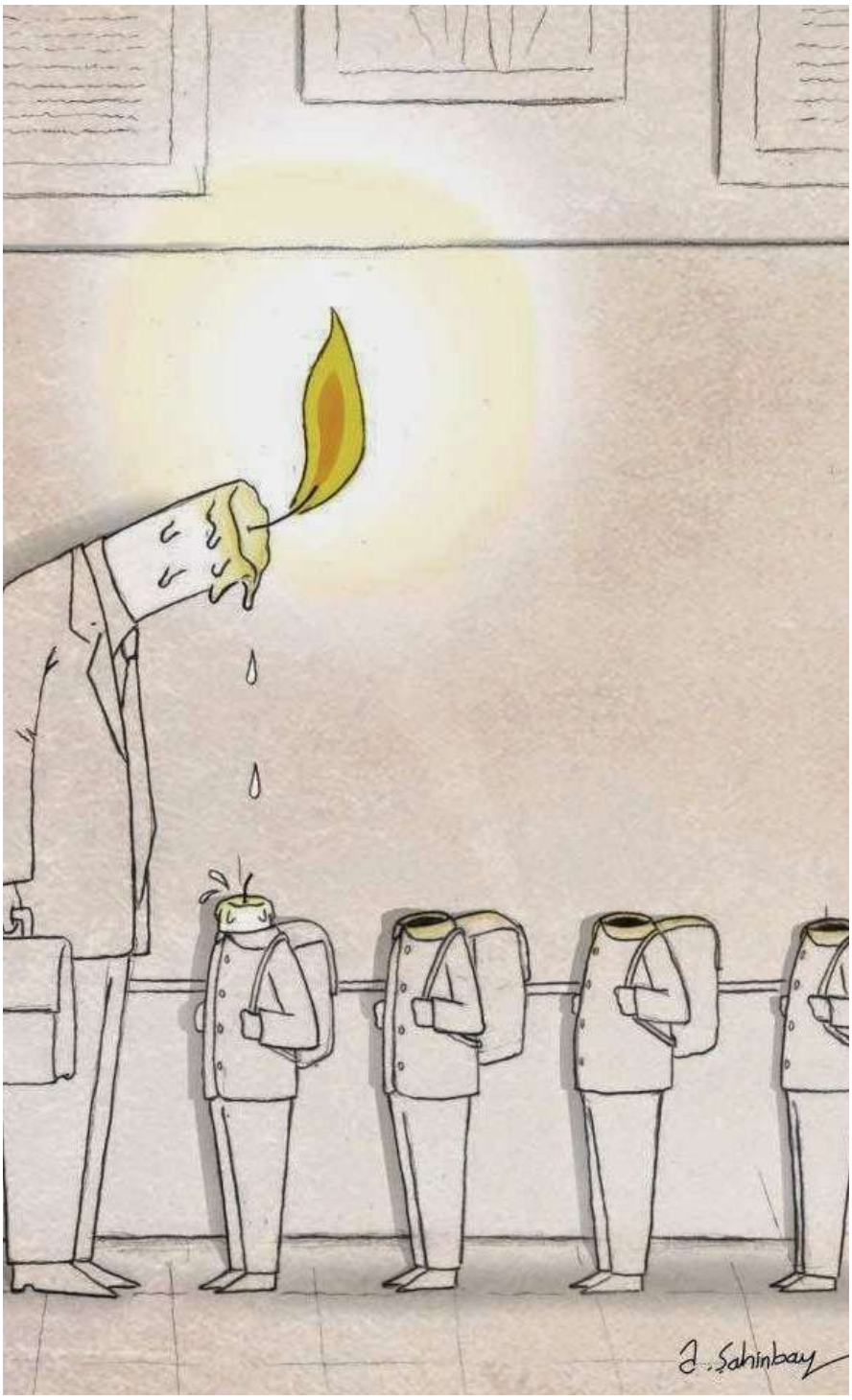

Informasi bergerak begitu cepat dan tak terbendung. Dalam arus deras informasi ini, kita butuh sumber yang dapat dipercaya. Ilmuwan hadir untuk memenuhi sumber kebutuhan itu. Mereka sumber cahaya, menyingkap kabut masalah. Ilmuwan jadi penunjuk jalan berdasarkan bukti dan fakta. Dalam era *post-truth* yang penuh opini dan hoaks, ilmuwan adalah lentera ilmu yang terpercaya.

Kepercayaan pada ilmuwan adalah modal penting untuk kemajuan. Tanpa kepercayaan, riset dan penemuan ilmiah diremehkan atau bahkan tidak diterima. Kepercayaan ini tentu saja tidak datang begitu saja. Ilmuwan harus transparan, jujur, dan komunikatif. Mereka harus dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Studi *Nature Human Behaviour* (April 2025) membuktikan bahwa masyarakat Indonesia paling percaya dengan ilmuwan. Survei global dengan 71.000 responden menempatkan ilmuwan Indonesia sebagai pemecah masalah nyata, mulai dari krisis iklim hingga kemiskinan.

Kepercayaan tinggi adalah peluang sekaligus tantangan. Ilmuwan harus menjawab dengan integritas. Mereka harus menjaga ilmu tetap netral dan independen. Tapi ada risiko ilmu digunakan untuk kepentingan politik. Di sinilah pentingnya komunitas ilmiah yang independen dan berkomitmen pada kemaslahatan bersama. Ilmuwan harus jadi penjaga objektivitas dan komunikasi sains yang jelas ke publik. Peran ilmuwan tak hanya di kampus atau laboratorium. Mereka harus turun ke akar rumput, ke desa, sekolah, dan komunitas sosial kemasyarakatan. Ilmu tetap harus membumi, sesuai budaya dan kebutuhan lokal. Dengan cara ini, hasil riset bisa diterima, dimanfaatkan dan berdampak bagi masyarakat.

Pada April 2025, Universitas Baylor, Universitas Harvard, Gallup, dan Center for Open Science (COS) melaporkan studi Global Flourishing Study (GFS) yang melibatkan 200.000 partisipan

dari 20 negara. Ditemukan bahwa Indonesia memiliki skor *Flourishing Index* tertinggi dengan angka 8,47 (skala 0-10), mengungguli banyak negara maju. Keberhasilan ini bukan hanya tentang ekonomi atau teknologi, tapi juga tentang makna hidup, relasi sosial, dan rasa komunitas yang kuat.

Global Flourishing Study 2025 ini menempatkan Indonesia di peringkat teratas dalam indeks kebahagiaan dan makna hidup. Ini karena masyarakat Indonesia kuat dalam relasi sosial dan komunitas. Ilmuwan berperan besar dalam membangun makna ini dengan hadir aktif di masyarakat, mendengarkan dan berdialog. Ilmu bukan monopoli akademik, tapi kolaborasi antara ilmuwan dan masyarakat. Kepercayaan publik makin kuat saat ilmuwan mampu hadir dalam keseharian masyarakat. Ilmuwan yang turun langsung, aktif di media sosial, dan mudah dimengerti, membuat sains terasa dekat. Ketika itu terjadi, masyarakat lebih terbuka menerima inovasi dalam berbagai bidang.

Tantangan ke depan adalah menjaga hubungan ini terus terbangun. Literasi sains harus berjalan konsisten. Kolaborasi lintas disiplin dan transparansi komunikasi penting melawan hoaks dan polarisasi informasi. Ilmuwan bukan sekadar pengamat, tapi mediator yang menjelaskan sains ke publik. Indonesia mencontohkan keberhasilan berdasarkan hasil *Global Flourishing Study.* Pengetahuan saat diterangi lentera ilmu yang jujur dan berintegritas, akan menerangi masa depan bangsa. Ilmuwan harus jadi pelita yang tak pernah padam. Mereka adalah lokomotif inovasi, mitra sejati masyarakat, yang membantu menyusun masa depan lebih adil dan berkelanjutan.

Kesenjangan Pendidikan dan Kerja

Namun, ada fakta lain yang perlu diperhatikan. Menteri Ketenagakerjaan dalam suatu kesempatan pada Juli 2025 mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia saat ini mencapai lebih dari satu juta orang. Selain itu, banyak studi dan laporan yang menunjukkan kesenjangan antara jurusan kuliah dan pekerjaan yang tersedia sangat signifikan. Banyak sarjana menganggur atau bekerja di sektor yang tidak memerlukan gelar sarjana. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan menjalankan pendidikan tinggi dan kenyataan kesempatan kerja.

Tabel 1: Persentase Penduduk berumur 25 tahun keatas menurut Jenis Kelamin dan Tamat Pendidikan Sarjana berdasarkan 10 Suku

No	Suku	Total	Perempuan	Laki-Laki
1	Batak	18,02	19,35	16,66
2	Minangkabau	18,00	20,91	15,06
3	Bali	14,54	12,76	16,31
4	Bugis	14,54	15,81	13,25
5	Betawi	14,38	14,47	14,29
6	Melayu	12,67	13,44	11,90
7	Banjar	11,24	11,66	10,82
8	Jawa	9,57	9,93	9,22
9	Sunda	7,59	7,46	7,73
10	Madura	4,15	3,50	4,82

Sumber: BPS-Long Form Sensus Penduduk 2020

Masyarakat Indonesia masih melihat gelar sarjana sebagai simbol harapan dan mobilitas sosial. Tapi fakta ekonomi belum sepenuhnya mendukung pandangan ini. Pertumbuhan dan kebahagiaan lebih didukung oleh relasi sosial dan solidaritas, bukan semata pendidikan formal. Peran ilmuwan sebagai lentera ilmu seharusnya tidak terbatas mendidik sarjana saja. Mereka harus menjadi pembimbing masyarakat, membantu menemukan makna dan solusi lokal. Pendidikan tinggi harus relevan, membumi, dan mampu mempercepat kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya soal gelar, tetapi kemampuan dan kreasi.

Kepercayaan publik pada ilmuwan tinggi, namun kritik terhadap pendidikan tinggi juga nyata. Tantangan utama adalah memastikan pendidikan dan sains menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara sosial dan kultural. Dengan begitu, lentera ilmu benar-benar menerangi jalan bangsa, bukan hanya hiasan kebanggaan.

Ilmuwan sebagai asset strategis

Dari sudut pandang ekonomi pengetahuan, ilmuwan adalah aset strategis bangsa. Pengetahuan yang mereka bawa menjadi faktor produksi utama di ekonomi berbasis inovasi. Negara maju membangun kekuatan ekonomi melalui riset dan pengembangan (R&D) yang kuat. Ilmuwan yang berintegritas dan berkomunikasi efektif mampu mendorong inovasi yang kompetitif.

Indonesia perlu meningkatkan anggaran R&D dan mengintegrasikan ilmuwan muda dalam kebijakan pembangunan. Kolaborasi lintas sektor dan interdisipliner harus diperkuat agar produk riset tidak terisolasi. Literasi sains yang meluas meningkatkan modal sosial dan meminimalisir resistensi terhadap perubahan inovatif.

Ilmuwan muda sebagai lentera ilmu adalah faktor penting untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Mereka menggerakkan teknologi dan ide baru yang berkelanjutan. Strategi pembangunan harus menempatkan riset sebagai prioritas. Investasi pada pendidikan tinggi yang relevan, pengembangan SDM terampil, dan kemitraan swasta-publik sebagai pilar utama.

Dengan pendekatan ini, ilmuwan bukan hanya pelopor ilmu pengetahuan, tapi juga penggerak ekonomi kreatif, teknologi, dan pembangunan inklusif. Lentera ilmu yang dibawa ilmuwan terutama ilmuwan muda akan menerangi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan mandiri. Ilmuwan menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

Nelson Mandela

Opini

Mendorong SDM Unggul di Pedesaan

Oleh **Dr. Mulyanto, M.E.**
Dosen FEB Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta,
Ketua Bidang Kajian dan Publikasi ISEI Surakarta, & Pengurus Pusat ISEI Bidang V

Dalam Lampiran 1 dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (halaman 17) telah dinyatakan bahwa selama kurun waktu 2019-2024 (target), status kinerja pembangunan desa dalam kategori 'Desa Mandiri' telah mengalami peningkatan dari sekitar 1.444 desa pada tahun 2019, menjadi sekitar 10.559 desa (target 2024) (lihat Gambar 1). Provinsi dengan jumlah 'Desa Mandiri' terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan daerah lain yang perlu didorong untuk peningkatan status desa menjadi 'Desa Mandiri' sebagian besar berada di wilayah Timur Indonesia.

Faktor yang menjadi pendorong peningkatan status pembangunan desa hingga tahun 2023 (khususnya dengan status 'Desa Mandiri'), menurut dokumen RPJMD Tahun 2025-2028 tersebut antara lain disebabkan oleh: (i) terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan menjadi sekitar 12,22% (dan menurun lagi hingga sekitar 11,03% pada Maret 2025); dan (ii) telah terjadi peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui sejumlah revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dengan hasil sekitar 9.114 BUMDesa dengan status 'BUMDesa Berkembang', sekitar 1.677 BUMDesa dengan status 'BUMDesa Maju', sejumlah 564 BUMDesa Bersama dengan status 'BUMDesa Bersama Berkembang', dan sekitar 532 BUMDesa Bersama dengan status 'BUMDesa Bersama Maju'.

Di lain pihak juga harus diakui bahwa hingga Maret 2025, tingkat kemiskinan di perdesaan masih sekitar 11,03% (atau sekitar 12,58 juta) dibanding yang terjadi di perkotaan yang besarnya mencapai 6,73% (atau sekitar 11,27 juta). Kemiskinan perdesaan yang terjadi di pulau Maluku-Papua, bahkan mencapai hingga sekitar 25,94% (atau sekitar 1,32 juta jiwa). Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 2.

Gambar 1
Tren Capaian Status Kinerja Pembangunan Desa dalam Kategori 'Desa Mandiri' dan 'Desa Berkembang' di Indonesia Tahun 2019-2024
(dalam satuan desa)

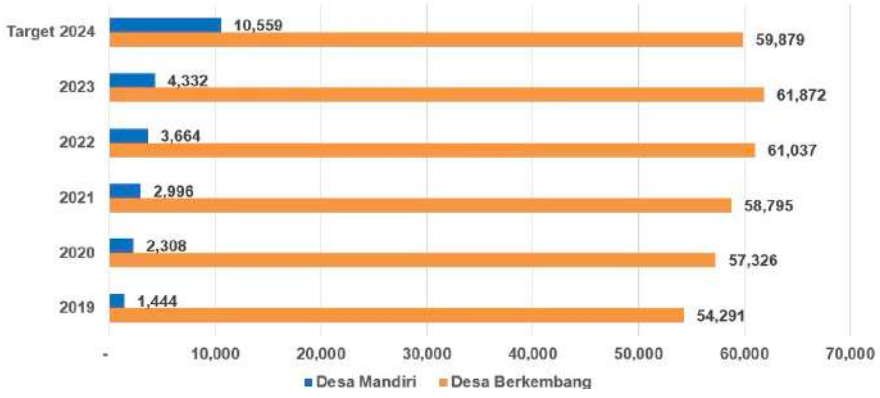

Sumber: data diolah dari Bappenas 2025.
Lampiran 1 Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. hal.17

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka upaya untuk terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul di perdesaan harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak (*stakeholders*), khususnya bagi lembaga-lembaga terkait yang membuat kebijakan tentang kemajuan pembangunan desa. SDM unggul di perdesaan secara umum dapat didefinisikan sebagai kondisi individu atau masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi (baca: SDM unggul) untuk mendukung pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kualitas hidup masyarakat yang berada di suatu desa atau di kawasan perdesaan yang bersangkutan.

Kondisi SDM yang unggul di perdesaan, diharapkan dapat membawa beberapa dampak positif dalam bentuk: (i) individu dan masyarakat di pedesaan dengan SDM unggul dapat meningkat kesejahteraan dan kemakmurannya, melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bentuk kegiatan sosial dan ekonomi di desanya; (ii) dengan SDM yang unggul di perdesaan, individu dan masyarakat di perdesaan dapat meningkat kualitas hidupnya melalui berbagai akses yang lebih baik dan lebih mudah di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya yang berada di perdesaan; dan (iii) SDM yang unggul di perdesaan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik-praktik pembangunan terbaik dan yang berkelanjutan, serta dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan di perdesaan, dengan indikator kinerja pembangunan desa yang berupa *Sustainable Development Goals* Desa (SDG Desa) akan semakin meningkat besarannya dari waktu ke waktu.

Gambar 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasar Pulau dan Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia pada Maret 2025
(dalam satuan jiwa dan persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025. Berita Resmi Statistik No. 63/07/Th. XXVIII. 25 Juli. hal. 14

Sebaliknya, kondisi SDM yang kurang atau tidak unggul di perdesaan dapat membawa dampak buruk dalam bentuk: (i) SDM individu dan masyarakat di perdesaan yang kurang unggul atau kurang berkualitas dapat membatasi produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bentuk kegiatan sosial dan ekonomi di perdesaan yang bersangkutan; (ii) kesempatan kerja di perdesaan menjadi terbatas dan banyak terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja di perdesaan, yang akhirnya dapat menyebabkan tingkat pengangguran dan berbagai masalah serius lainnya di perdesaan; dan (iii) upaya untuk menanggulangi / menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan menjadi sulit tercapai dan tidak berjalan sebagaimana yang telah banyak ditetapkan dan dirumuskan/ditargetkan.

Harus diakui bahwa kondisi SDM perdesaan di Indonesia saat ini (hingga Maret 2025 sesuai profil / kondisi kemiskinan di perdesaan dari Badan Pusat Statistik (BPS)), masih menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: (i) kemiskinan yang tinggi di perdesaan dapat diakibatkan oleh akses ke pendidikan berkualitas yang masih terbatas, sehingga banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja nasional, apalagi di pasar kerja global; (ii) minimnya pengembangan keterampilan teknologi (termasuk pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan) dan kurangnya pelatihan keterampilan kerja yang berkelanjutan, sehingga menjadi hambatan bagi SDM perdesaan untuk berkembang secara lebih baik dan berkelanjutan; dan (iii) kualitas pendidikan di daerah pedesaan masih relatif rendah, yang diindikasikan dengan tingkat literasi dan numerasi yang belum memenuhi standar nasional, apalagi standar internasional.

Untuk meningkatkan dan mendorong kualitas SDM perdesaan menjadi unggul, maka beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (i) perlu dan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, pihak swasta, dan organisasi non-pemerintah (baca: lembaga swadaya masyarakat (LSM)) untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas di wilayah perdesaan; (ii) penting dan perlunya berbagai jenis pelatihan keterampilan kerja yang berbasis teknologi diberikan dan terus diperluas di perdesaan, dalam upaya mengakomodasi dan meningkatkan ketrampilan tenaga kerja di semua sektor / bidang (semisal: pertanian, perikanan, industri kecil, dan sebagainya); (iii) terus meningkatkan investasi dalam bentuk pelatihan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja perdesaan di Indonesia agar mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

Sementara itu, SDM yang unggul di perdesaan akan ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut: (i) tingkat pendidikan masyarakat desa yang tinggi merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di perdesaan; (ii) peningkatan keterampilan masyarakat di perdesaan dalam berbagai bidang, seperti: pertanian, perikanan, industri kecil, juga sektor / bidang lain yang menjadi potensi /unggulan di desa/ perdesaan yang bersangkutan; (iii) tingkat partisipasi aktif masyarakat desa semakin meningkat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, sehingga keberhasilan pembangunan desa dapat dirasakan dari tahun ke tahun; dan (iv) secara tidak langsung desa / perdesaan akan mampu menyumbang besaran indeks pembangunan manusia (IPM), melalui peningkatan peran dan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat di perdesaan.

Dengan kata lain, SDM unggul di perdesaan akan ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut: Pertama, di bidang pendidikan, akan terjadi peningkatan dalam tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di perdesaan, angka melek huruf, dan angka partisipasi sekolah. Kedua, di bidang kesehatan, akan terjadi peningkatan dalam usia harapan hidup (UHH), terjadi penurunan dalam angka kematian bayi dan ibu melahirkan di perdesaan, dan akses ke fasilitas kesehatan semakin membaik. Ketiga, dalam hal keterampilan, akan terjadi peningkatan jumlah masyarakat desa yang memiliki keterampilan khusus (semisal: ketrampilan di bidang pertanian, perikanan, kerajinan, dan ketrampilan pendukung lainnya), dan banyak tawaran pelatihan dan pengembangan keterampilan di perdesaan yang diikuti oleh banyak masyarakat di desa yang bersangkutan secara aktif. Keempat, dalam hal produktivitas, akan terjadi peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di perdesaan, terjadi peningkatan dalam hal produktivitas kerja, dan terjadi peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (SD), baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Terakhir, kelima, dalam hal partisipasi masyarakat, akan terjadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, dan terjadi peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu SDM ke arah yang unggul di perdesaan di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif yang melibatkan banyak pihak (stakeholders), baik itu pihak pemerintah, swasta, dan juga masyarakat secara luas (termasuk LSM); untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, pengembangan keterampilan teknologi (terutama teknologi tepat guna), dan investasi dalam bentuk berbagai pelatihan keterampilan tenaga kerja di perdesaan. Jika hal tersebut terjadi maka harapan besar terbentuknya desa-desa dalam kategori 'Desa Mandiri' akan semakin tercapai/terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam dokumen RPJMN tahun 2025-2029. Semoga!

Opini

Membangun Pendidikan Indonesia yang Lebih Baik: **Pelajaran dari Nobel Ekonomi 2019**

Oleh **Yohanes Berenika Kadarusman, Ph.D.**
Pengurus Pusat ISEI Bidang III & Dosen Universitas Prasetiya Mulya

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan." Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaikan keterangan pemerintah RUU APBN dan Nota Keuangan 2026 pada 15 Agustus 2025 lalu.

Image by Niklas Elmehed

Dalam konteks hubungan antara pendidikan dan kemiskinan, Duflo (2001, 2004) menemukan bukti hubungan positif antara ekspansi akses sekolah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, ketika pemerintah Orde Baru melakukan intervensi masif dan cepat dengan membangun lebih dari 61.000 sekolah dasar (dikenal sebagai SD Inpres) dalam waktu 5 tahun. Temuan di Indonesia saat itu menunjukkan bahwa dampak setiap tambahan pembangunan sekolah dasar per 1.000 anak telah meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 0,12-0,19 tahun. Bertambahnya lama sekolah tersebut berdampak lanjutan menjadi kenaikan upah yang mencapai 1,5-2,7%. Kenaikan upah ini didorong oleh meningkatnya produktivitas dan efisiensi pekerja yang bersekolah lebih lama. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sekolah dapat meningkatkan modal manusia dan berkontribusi positif terhadap produktivitas ekonomi.

Penelitian tentang hubungan pendidikan, pasar tenaga kerja dan kemiskinan di Indonesia telah membawa Esther Duflo menjadi salah satu peraih hadiah Nobel Ekonomi 2019 bersama-sama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer. Mereka mendapatkan hadiah Nobel ekonomi karena berkontribusi dalam menggunakan berupa eksperimen lapangan (*Randomized Controlled Trials*) dalam desain penelitian pengentasan kemiskinan. Dengan metode tersebut dapat memberikan data yang akurat dan konsisten untuk membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan intervensi yang tepat sasaran. Esther Duflo tidak hanya sebagai perempuan kedua yang menerima hadiah Nobel Ekonomi, tetapi juga penerima Nobel Ekonomi termuda.

Dari pernyataan Presiden Prabowo, pendidikan di Indonesia saat ini diarahkan tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga modal manusia unggul dan berdaya saing. Tentu saja tantangan yang dihadapi saat ini tidak sesederhana seperti tahun 1970an saat kebijakan pembangunan SD Inpres secara masif dan cepat berhasil meningkatkan lama sekolah siswa dan produktivitas pekerja. Luaran pendidikan di Indonesia saat ini dapat terlihat dari data 2024; rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas mencapai 9,22 tahun atau setara SMP/sederajat. Kondisi ini didukung oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk penduduk umur 7-15 (setara SD s/d SMP/sederajat) yang sudah hampir 100%. Sementara itu APS untuk kelompok umur 19-23 tahun (setara D1 s/d S1) hanya mencapai 29,01%, mengindikasikan masih terbatasnya akses penduduk terhadap pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan modal manusia Indonesia tantangan ke depan adalah bagaimana rasio penduduk dengan jenjang pendidikan tinggi dapat ditingkatkan. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia lebih dari cukup dimana data PD Dikti mencatat 4.416 unit. Jumlah perguruan tinggi ini lebih banyak daripada China yang memiliki penduduk lebih banyak daripada Indonesia tetapi mampu mencapai APS sebesar 75%.

Selain masih terbatasnya rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia, tantangan berikutnya adalah mutu pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Dari data PD Dikti terlihat bahwa mayoritas perguruan tinggi di Indonesia terakreditasi Baik/B (2.991) sementara jumlah perguruan tinggi dengan status akreditasi Unggul/A hanya sebanyak 161. Bahkan masih terdapat 819 perguruan tinggi yang tidak terakreditasi. Akreditasi perguruan tinggi menjadi indicator penjaminan mutu proses dan capaian pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan masih terbatasnya jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul/A sulit mengharapkan mutu pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan dengan pengetahuan unggul dan ketrampilan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja. Dampaknya lulusan perguruan tinggi sulit mendapatkan pekerjaan formal dan berkontribusi pada produktivitas ekonomi.

Penelitian Esther Duflo dan Nobel Ekonomi 2019 mengingatkan kembali bahwa pendidikan adalah modal pembangunan yang kuat, namun dampaknya sangat bergantung pada bagaimana pendidikan diselenggarakan. *Schooling is not the same as learning.* Untuk Indonesia, lompatan berikutnya dalam meningkatkan modal manusia yang unggul dan berdaya saing tidak akan datang dari membangun lebih banyak sekolah, terutama perguruan tinggi, tetapi dari mengubah sekolah menjadi pusat pembelajaran yang relevan dan berdampak.

Opini

Beyond Skills: X-Talent Karakter untuk Pemimpin Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh **Elfindri** Professor Ekonomi SDM, Universitas Andalas dan
Ofanto Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi & Penerima Beasiswa pada FEB, Universitas Andalas

Indonesia sedang berada pada titik penting dalam sejarahnya. Bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang puncaknya diperkirakan pada dekade 2030 dapat menjadi momentum luar biasa jika dikelola dengan cermat. Namun, potensi ini tidak akan terwujud tanpa membangun karakter dan integritas kepemimpinan, bukan hanya sekadar keterampilan teknis.

Menurut BPS, sebanyak 20,31 % pemuda Indonesia (usia 15–24 tahun) pada 2024 termasuk dalam kategori NEET (*Not in Education, Employment, or Training*). Jumlah sebesar ini dapat merusak bonus demografi jika tidak segera diatasi. Kementerian PPN/Bappenas menyarankan dua pendekatan: pembangunan karakter pekerja melalui etos kerja dan life skills, serta perbaikan kesesuaian kurikulum teknis dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, fenomena *skill mismatch* di mana lulusan bekerja di bidang yang tidak relevan dengan pendidikan mereka masih menjadi persoalan serius. BPS melaporkan bahwa hanya 12 % angkatan kerja yang pernah menerima pelatihan kerja, dan lebih dari separuh pekerja berada di posisi yang tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya soal akses pendidikan, melainkan tentang relevansi dan kualitasnya.

Krisis Kepemimpinan Karakter: Saat Kompetensi Tanpa Integritas Berkuasa

Dalam dua dekade terakhir, orientasi sistem pendidikan dan dinamika pasar kerja di Indonesia secara dominan diarahkan pada capaian keterampilan teknis. Arah kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada aspek teknis tersebut, tanpa diimbangi oleh pembinaan karakter, telah menimbulkan asimetri dalam proses pembentukan kualitas kepemimpinan. Konsekuensinya, muncul figur pemimpin yang unggul secara intelektual, namun miskin integritas moral. Fenomena korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan indikasi nyata dari rapuhnya basis etis yang seharusnya menopang kompetensi teknis tersebut.

Fukuyama (1995) secara teoritis telah menegaskan bahwa keberhasilan institusi modern tidak dapat direduksi pada kapasitas teknis semata, melainkan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*) yang mengikat individu-individu dalam suatu sistem sosial. Tanpa fondasi moral yang kokoh, akumulasi keterampilan teknis justru melahirkan bentuk kompetensi semu yang rapuh secara substantif dan rentan terhadap penyalahgunaan.

Kajian-kajian kontemporer memperkuat pandangan ini. Studi dalam *The Leadership Quarterly* menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada keterpaduan antara kecakapan profesional dan legitimasi moral. Dengan demikian, keterampilan teknis baru memperoleh signifikansinya apabila dilekatkan pada integritas etis yang memampukan seorang pemimpin untuk meraih kepercayaan sosial. Kerangka *behavioral leadership theory* memperjelas hal ini dengan menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar akumulasi keterampilan, melainkan praktik yang menuntut konsistensi etis, keteladanan, serta keberpihakan pada prinsip keadilan.

Dalam konteks digital, persoalan kepemimpinan menemukan kompleksitas baru. Ketersediaan teknologi mempercepat akuisisi keterampilan teknis *coding*, *data science,* hingga *digital marketing* dapat dikuasai melalui modul-modul daring singkat namun percepatan tersebut kerap tidak diiringi dengan internalisasi etika profesi maupun tanggung jawab sosial. Banks dkk. (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan di era digital telah mengalami pergeseran paradigmatik: ia berlangsung tidak lagi dalam ruang-ruang formal semata, melainkan juga melalui interaksi virtual yang dimediasi algoritma, di mana penekanan pada performa teknis kerap menyingkirkan dimensi karakter. Pertanyaan kritis pun mengemuka: apakah generasi yang lahir dalam kemudahan akses pengetahuan teknis mampu mengartikulasikan kepemimpinan yang jujur, adil, dan visioner? Jika tidak, maka keterampilan yang diperoleh hanya akan menghasilkan keunggulan superfisial tanpa kontribusi substantif bagi keberlanjutan bangsa.

Dengan demikian, Indonesia tengah menghadapi sebuah paradoks pembangunan sumber daya manusia: semakin tinggi pencapaian teknis yang diraih, semakin besar pula potensi deviasi jika tidak disertai oleh penguatan integritas moral. Situasi ini menegaskan urgensi reintegrasi pendidikan keterampilan dengan pendidikan karakter, sehingga orientasi pembangunan manusia tidak berhenti pada pembentukan pekerja terampil, melainkan bergerak menuju lahirnya pemimpin yang berkompetensi sekaligus berintegritas.

X-Talent Karakter: Pemimpin Masa Depan di Luar Kompetensi Teknis

Konsep X-Talent Karakter lahir dari kebutuhan historis dan struktural bangsa untuk melampaui paradigma lama yang semata-mata menekankan pencapaian

keterampilan teknis. Dalam konteks dinamika global yang ditandai oleh percepatan digitalisasi, disrupsi teknologi, serta krisis kepercayaan publik, kompetensi teknis terbukti tidak lagi cukup menjadi penentu kualitas kepemimpinan. Yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun integritas, keteguhan karakter, dan

orientasi moral yang jelas dalam setiap praksis kepemimpinan.

X-Talent Karakter pada hakikatnya menempatkan kompetensi etis dan sosial sejajar, bahkan lebih utama, dibandingkan kecakapan teknis. Ada tiga ciri pokok yang menjadi fondasi utama:

1. Integritas sebagai identitas: yakni konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai moral. Integritas bukan sekadar atribut personal, melainkan sumber legitimasi sosial yang menentukan tingkat kepercayaan publik.
2. Kepemimpinan visioner: keberanian mengambil keputusan jangka panjang yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar akomodasi kepentingan jangka pendek.
3. Ketahanan karakter: daya tahan moral dan psikologis untuk tetap teguh di tengah derasnya disrupsi digital, tekanan politik, dan godaan ekonomi.

Dengan karakteristik demikian, X-Talent Karakter diposisikan sebagai agen transformasi bangsa, yang tidak hanya mampu menavigasi era ekonomi hijau, digitalisasi, dan transformasi sosial, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berakar pada integritas dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Dengan demikian, menuju Indonesia Emas 2045, bangsa ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja terampil, melainkan pemimpin berkarakter yang mampu menyatukan kompetensi dengan nilai moral yang kokoh.

Tabel 1. Data Empiris Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2024

Indikator	Data Terkini
NEET (15–24 tahun)	20,31% anak muda tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak pelatihan
Pelatihan kerja	Hanya 12% angkatan kerja pernah menerima pelatihan kerja formal
Mismatch pendidikan & pekerjaan	>50% pekerja bekerja di luar bidang studi
Pengangguran terbuka	4,9% atau ±7,45 juta orang; soft skill menjadi masalah besar
Soft skills & PHK awal	Lemahnya komunikasi, kerja sama, dan etika kerja berkontribusi pada PHK tahun pertama

Data Empiris Terkini yang Relevan

Berbagai indikator mutakhir memperlihatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Indonesia masih menghadapi dilema serius antara peningkatan kompetensi teknis dan kelemahan karakter.

Data BPS 2024 menunjukkan bahwa sekitar 20,31 persen anak muda berusia 15– 24 tahun tergolong NEET (not in employment, education, or training). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan hilangnya momentum generasi produktif untuk membangun kompetensi sekaligus menginternalisasi nilai karakter. Generasi yang menganggur sejak dini berpotensi membebani struktur sosial-ekonomi dalam jangka panjang, terutama dalam konteks bonus demografi.

Di sisi lain, tercatat bahwa hanya 12 persen angkatan kerja pernah menerima pelatihan formal. Fakta ini mengindikasikan terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi dalam menjawab tuntutan pasar kerja. Kondisi diperburuk oleh mismatch pendidikan dan pekerjaan yang mencapai lebih dari 50 persen. Artinya, separuh lebih tenaga kerja bekerja di luar bidang studinya, sehingga efisiensi alokasi sumber daya manusia menjadi rendah, sekaligus memperlihatkan lemahnya koordinasi antara institusi pendidikan dengan kebutuhan riil industri.

Lebih jauh, tingkat pengangguran terbuka masih mencapai 4,9 persen atau sekitar 7,45 juta orang. Hal ini menegaskan bahwa persoalan mendasarnya tidak semata pada keterampilan teknis, melainkan pada lemahnya soft skills komunikasi, kerja sama, dan etika kerja yang menjadi penyebab dominan tingginya pemutusan hubungan kerja pada tahun pertama. Fenomena ini membuktikan bahwa krisis kepemimpinan karakter bukan hanya persoalan elite politik, tetapi juga melekat pada level pekerja baru yang belum dibekali ketahanan moral dan etika profesional.

Dengan demikian, data empiris terkini memperlihatkan bahwa pembangunan SDM Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam dikotomi sempit antara hard skills dan soft skills. Justru, integrasi pendidikan vokasi dengan penguatan karakter merupakan agenda strategis yang menentukan apakah bonus demografi dapat diubah menjadi dividen demografi, atau justru menjadi beban struktural yang menghambat visi Indonesia Emas 2045.

Strategi Terpadu untuk Melahirkan X-Talent Karakter

Mewujudkan X-Talent Karakter menuju Indonesia Emas 2045 menuntut strategi terpadu lintas level, mulai dari pendidikan formal hingga ekosistem sosial-politik. Strategi ini tidak dapat dilihat sebagai upaya parsial, melainkan sebagai arsitektur kebijakan holistik yang menjembatani pendidikan, keluarga, masyarakat, dan negara.

1. **Reformasi Pendidikan Karakter dan Kurikulum.** Kurikulum Merdeka perlu diperluas dengan modul integritas, etika publik, kepemimpinan moral, dan kewarganegaraan global. Pembelajaran tidak cukup hanya membentuk kemampuan literasi atau numerasi, melainkan harus menanamkan *character literacy* yaitu literasi nilai yang membekali peserta didik dengan kompas moral dalam pengambilan keputusan.
2. **Keluarga dan Lingkungan sebagai Basis.** Keluarga merupakan madrasah pertama dalam pembentukan karakter. Melalui pola asuh berbasis nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati, keluarga dapat menjadi fondasi utama ketahanan moral generasi muda. Dukungan lingkungan sosial, media, dan institusi publik yang konsisten memberikan teladan integritas akan memperkuat proses internalisasi nilai.
3. **Ekosistem Politik dan Birokrasi yang Beretika.** Pendidikan karakter tidak akan efektif jika birokrasi tetap terjebak dalam praktik transaksional. Birokrasi bersih, kepemimpinan publik yang menampilkan keteladanan, serta penerapan meritokrasi adalah pilar yang menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan berkarakter.
4. **Revitalisasi Sekolah Vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) Berbasis Karakter.** Mengatasi *mismatch* antara pendidikan dan dunia kerja menuntut desain vokasi yang responsif terhadap kebutuhan industri, termasuk sektor digital dan ekonomi hijau. Namun, yang membedakan X-Talent adalah integrasi *soft skills* komunikasi, etos kerja, kepemimpinan dengan pendidikan vokasi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas.
5. **Penguatan Kepemimpinan Generasi Muda.** Program inovatif seperti parlemen muda, inkubasi kepemimpinan, dan social entrepreneurship harus diposisikan sebagai ruang latihan sosial bagi generasi muda. Melalui program tersebut, pemuda tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai agent of change yang mampu membangun transformasi sosial, ekonomi, dan politik berbasis nilai integritas.

Dengan strategi terpadu tersebut, Indonesia berpeluang melahirkan generasi X-Talent Karakter yang tidak hanya adaptif terhadap disrupsi global, tetapi juga mampu mengawal agenda besar Indonesia Emas 2045 dengan pijakan moral yang kokoh.

Kompas Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud bila kepemimpinannya berakar pada integritas. Keterampilan tanpa karakter adalah ancaman; karakter tanpa keterampilan adalah stagnasi. Empat arah utama harus ditempuh bersamaan: pendidikan karakter yang sistemik, lingkungan politik yang memberi teladan, pendidikan vokasi yang relevan dan etis, serta kepemimpinan muda yang diperlengkapi soft skills dan moralitas.

Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas, tetapi juga bijak; tidak hanya produktif, tetapi juga bertanggung jawab. **Beyond skills, X-Talent Karakter adalah kompas yang akan membawa bangsa menuju kejayaan peradaban 2045.**

Opini

Mengejar Pendidikan Unggul: **Mengukur Tepat Sasaran Dana Pendidikan**

Oleh **Jonathan Ersten Herawan**
Mahasiswa Prodi MET FEB UAJ

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan DPR menegaskan komitmen Pemerintah untuk terus memperkuat alokasi pendidikan sesuai amanat konstitusi, yakni sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2026, alokasi dana pendidikan mencapai Rp757,8 triliun.

Regulasi Dana Pendidikan

Dalam PP Nomor 18 tahun 2022 yang mengatur mengenai pendanaan pendidikan telah menyebutkan secara jelas dan gamblang bahwa dana pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan, atau berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.

Bahkan dalam pasal 81 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah juga diminta mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar-besarnya 20% seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat:

Pasal 81

(1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataan ini berlawanan dengan aturan di lapangan dimana terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2009 yang mencederai fungsi pendidikan di dalamnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
(2) Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBN untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN
Pasal 2

(1) Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus).
(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan terhadap seluruh Belanja Negara.
(3) Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam APBN.

Tata Kelola Dana Pendidikan

Kesalahan tersebut mengenai penambahan frasa "Fungsi Pendidikan" merupakan bukti mencederai semangat Undang Nomor 20 tahun 2003 dan PP Nomor 18 tahun 2022 mengenai cita-cita Indonesia menjadi "*Welfare State*". Kejahatan dalam bidang pendidikan merupakan kejahatan yang bersifat keberlanjutan karena akan menimbulkan masalah jangka panjang. Bahkan lebih lanjut, dana Pendidikan dibagi ke 17 K/L melalui sekolah kedinasan dimana pada tahun 2024 sebanyak 13 ribu orang mendapatkan alokasi dana sebanyak Rp104 T namun peserta pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berjumlah 64 juta orang hanya menikmati Rp97 Triliun.

Lebih lanjut, kurang tepatnya sasaran alokasi anggaran pendidikan Indonesia juga terjadi pada alokasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI) hanya sebesar Rp104,67 triliun. Pada tahun 2023, kondisi serupa juga terlihat, dengan total dana pendidikan sebesar Rp608,3 triliun tetapi Kemendikbudristek RI hanya mengelola Rp84,53 triliun.

Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan ke pos lain di luar K/L yang secara langsung tidak menangani pendidikan. Akibatnya, belanja fungsi pendidikan menjadi lebih dominan dibandingkan yang semestinya diarahkan Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan ke pos lain di luar K/L yang secara langsung tidak menangani pendidikan. Akibatnya, belanja fungsi pendidikan menjadi lebih dominan dibandingkan yang semestinya diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tenaga pengajar, serta sarana dan

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	26.053.200.806.000	25.768.344.955.544	98.91	24.437.508.594.000	23.956.235.896.196	98.03
Belanja Barang	40.778.639.632.000	37.578.779.070.111	92.15	32.051.749.291.000	29.763.154.764.125	92.86
Belanja Modal	10.716.205.968.000	9.754.494.787.482	91.03	6.510.423.174.000	5.603.293.925.284	86.07
Belanja Bansos	27.119.652.993.000	26.915.201.913.461	99.25	21.528.079.902.000	21.394.118.941.819	99.38
Jumlah Belanja	104.667.699.399.000	100.016.820.726.598	95.56	84.527.760.961.000	80.716.803.527.424	95.49
Anggaran Pendidikan	665.000.000.000.000	519.800.000.000.000	78.17	608.300.000.000.000	513.380.000.000.000	84.39

Sumber: Kemenkeu RI (2024)

prasarana pendidikan sehingga tidak berdampak optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Jika melihat lebih jauh, tren realisasi belanja Pemerintah pada dana pendidikan juga menunjukkan ketidakseimbangan. Selama tahun 2023 dan 2024, serapan tertinggi selalu terjadi pada belanja pegawai dengan rata-rata penyerapan mencapai 98,91 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa belanja Pemerintah lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan rutin pegawai, seperti gaji, tunjangan, dan honorarium, dibandingkan pada belanja modal dan barang yang secara langsung berhubungan dengan kualitas layanan publik, termasuk layanan pendidikan. Belanja barang dan belanja modal cenderung rendah, masing-masing berada di kisaran 91–92 persen. Ironisnya, bahkan belanja bantuan sosial (bansos) juga menyerap porsi besar dan diprioritaskan dibandingkan belanja produktif karena serapannya lebih tinggi dibandingkan yang lain

Kegagalan Menciptakan Pendidikan dan SDM Unggul

Kondisi ini semakin kontras jika dibandingkan dengan capaian Indonesia dalam studi internasional, khususnya hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. Skor PISA Indonesia hanya berada pada angka 369 poin, yang merupakan skor terendah sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam asesmen ini dan bahkan sejajar dengan skor pada tahun 2003 serta 2006. Secara lebih rinci, skor Indonesia pada domain matematika adalah 366 poin, membaca 359 poin, dan sains 383 poin. Dari ketiga domain tersebut, kemampuan membaca siswa Indonesia menjadi yang terendah.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, posisi Indonesia masih tertinggal jauh. Secara global, Indonesia hanya unggul dari beberapa negara seperti Palestina, Yordania, Filipina, Uzbekistan, dan Kamboja. Salah urus dalam pengelolaan dana pendidikan juga dapat terlihat dari indikator return of education (ROE), yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi pendidikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Penulis terlihat bahwa Return of Education (ROE) Indonesia cenderung berfluktuasi bahkan menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017, ROE masih berada pada level 6,17 persen, lalu menurun menjadi 5,92 persen pada 2018, dan terus melemah hingga 3,61 persen pada 2019. Pandemi COVID-19 memperparah kondisi tersebut dengan mencatatkan angka

negatif pada 2020 sebesar -5,73 persen. Tren tersebut memperlihatkan bahwa investasi besar dalam pendidikan tidak konsisten memberikan pengembalian yang signifikan bagi pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas tenaga kerja.

Serius Perbaiki Tata Kelola

Penting untuk dicatat bahwa pendidikan bukan hanya soal alokasi anggaran yang besar, melainkan juga soal efektivitas dan kualitas pengelolaan. Banyak negara lain yang mampu mencapai kualitas pendidikan tinggi dengan alokasi anggaran yang relatif lebih kecil, namun dikelola dengan tepat sasaran. Misalnya, negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan dan Singapura berhasil menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan dengan strategi yang terarah, fokus pada peningkatan kualitas guru, kurikulum berbasis kompetensi, serta pemanfaatan teknologi pendidikan secara masif. Indonesia seharusnya dapat belajar dari praktik-praktik terbaik ini untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Tahun	Return on Education
2017	6,17
2018	5,92
2019	3,61
2020	-5,73
2021	6,39
2022	11,84
2023	3,53

Statement bahwa **"Guru Adalah Beban Negara"** perlu menjadi koreksi, karena pendidikan adalah bentuk investasi negara yang menjadi amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk "mencerdaskan kehidupan Bangsa".

Beberapa langkah yang perlu ditempuh: 1) Mengkoreksi struktur alokasi belanja Pemerintah dalam bidang pendidikan. Anggaran yang lebih besar harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas pembelajaran digital, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan; 2) Pemerintah harus menghapus frasa "fungsi pendidikan" dalam PMK No. 86 Tahun 2009 karena bertentangan dengan cita-cita Bangsa dan menjadi ketidakmandirian K/L karena bergantung pada APBN; 3) Evaluasi berbasis kinerja harus diterapkan secara ketat, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM nasional.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Publik perlu mengetahui secara jelas bagaimana dana pendidikan digunakan, program apa saja yang dibiayai, serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat, akademisi, dan lembaga independen dalam proses evaluasi anggaran harus diperluas agar pengawasan berjalan lebih optimal. Dengan demikian, tantangan menciptakan sdm dan pendidikan unggul untuk menunjang Visi Indonesia Emas 2045 masih dapat kita upayakan.

Opini

Pendidikan Unggulan dan Profesi di Indonesia: **Menyiapkan Generasi Unggul di Era AI**

Oleh **Aldrin Herwany, Ph.D.**
Dosen Perbanas Institute dan Pengurus Pusat ISEI Bidang V

Pendidikan di Indonesia harus beradaptasi dengan cepat untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja. Saat ini, memiliki gelar saja tidak cukup. Lulusan harus memiliki keahlian yang relevan dan soft skills seperti berpikir kritis dan kemampuan beradaptasi. Sayangnya, sering ada kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan industri. Di era disrupsi ini, tantangan terbesar datang dari kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), yang berpotensi menggantikan banyak pekerjaan rutin.

Kombinasi AI dan Pendidikan: Kunci Masa Depan.

Konsep *link and match* menjadi semakin krusial dengan masuknya AI. Ini bukan lagi sekadar menyelaraskan kurikulum dengan industri, tetapi juga dengan teknologi yang akan mendefinisikan pekerjaan di masa depan. AI harus dilihat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang memperkuat kemampuan manusia. Pendidikan harus mengajarkan bagaimana berkolaborasi dengan AI, bukan bersaing dengannya.

Untuk mewujudkannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Integrasi AI dalam Kurikulum: Pelajaran tentang dasar-dasar AI, etika AI, dan pemanfaatan AI harus dimasukkan ke dalam kurikulum di semua jenjang. Mahasiswa tidak hanya belajar memprogram AI, tapi juga bagaimana menggunakan alat AI untuk memecahkan masalah di bidang mereka masing-masing, entah itu di bidang kedokteran, arsitektur, atau seni.
2. Fokus pada Keterampilan Manusia Unik: AI bisa melakukan tugas berulang dengan cepat, tapi belum bisa menggantikan kreativitas, pemikiran strategis, empati, dan kecerdasan emosional. Pendidikan harus lebih fokus mengasah keterampilan-keterampilan ini, yang akan selalu dibutuhkan di dunia kerja.
3. Pendidikan Sepanjang Hayat: Dengan pesatnya perkembangan teknologi, satu set keterampilan tidak akan cukup untuk seumur hidup. Institusi pendidikan harus menyediakan program pelatihan ulang atau reskilling bagi para profesional yang sudah bekerja, agar mereka bisa terus relevan dengan perubahan.

Pelajaran dari Masa Lalu, Langkah untuk Masa Depan

Sejarah pendidikan kita menunjukkan perubahan fokus. Di era Orde Baru, kebijakan cenderung sentralistis dan fokus pada standardisasi. Era Reformasi lebih desentralistis dengan fokus pada peningkatan kualitas guru. Lalu, Menteri Nadiem Makarim datang dengan terobosan seperti Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang memberikan otonomi lebih pada kampus dan mendorong pengalaman belajar di luar kelas. Pendekatan ini lebih gesit dan relevan dengan zaman. Pendekatan Nadiem dianggap lebih agile dan responsif terhadap perubahan. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi program-program ini merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya di kampus-kampus besar.

Saat ini dan Ke depan, Kabinet Prabowo memisahkan Kementerian Pendidikan menjadi tiga: Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, dan Kembud. Pemisahan ini memiliki potensi untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan kebijakan yang lebih terarah. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan koordinasi yang solid di antara ketiga kementerian ini. Jangan sampai terjadi kebijakan yang tumpang tindih atau tidak sinkron, yang justru dapat menghambat kemajuan.

Dengan kata lain pemisahan ini berpotensi membuat kebijakan lebih terfokus. Menteri Diktsaintek bisa lebih fokus pada riset dan kolaborasi industri, termasuk dengan perusahaan teknologi dan AI. Dengan fokus khusus pada pendidikan tinggi, menteri ini dapat lebih intensif dalam mendorong riset, inovasi, dan kolaborasi dengan industri. Pemisahan ini memungkinkan kementerian untuk merancang kebijakan yang sangat spesifik untuk perguruan tinggi, termasuk penyesuaian kurikulum dan program *link and match* yang lebih efektif.

Fokus pada pendidikan dasar dan menengah akan memungkinkan kementerian ini untuk meningkatkan kualitas guru, meratakan akses pendidikan, dan menanamkan fondasi karakter sejak dini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa memiliki dasar yang kuat sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dikdasmen dapat memastikan bahwa literasi digital dan fondasi berpikir logis diajarkan sejak dini.

Menteri Kebudayaan bisa membantu kita memahami bagaimana teknologi berinteraksi dengan nilai-nilai budaya. Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri dapat lebih fokus pada pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya bangsa. Ini juga penting untuk menyeimbangkan antara pendidikan yang berorientasi profesi dengan pembentukan identitas nasional yang kuat. Pemisahan ini bisa menciptakan birokrasi yang lebih efisien, asalkan koordinasinya berjalan baik.

Singkatnya, untuk menciptakan pendidikan unggulan, kita harus terus memperkuat link and match, tetapi kini dengan memasukkan AI sebagai elemen kunci. Kita perlu mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kurikulum, menumbuhkan keterampilan manusia yang unik, dan menciptakan sistem pendidikan yang mendorong pembelajaran seumur hidup. Tujuannya adalah mencetak lulusan yang tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu berkolaborasi dengan teknologi untuk memecahkan masalah kompleks di masa depan.

Opini

LPK dan LSP Pilar Kompetensi Tenaga Kerja di Tengah Dinamika Industri 4.0

Oleh **NS. Aji Martono**
Komisioner BNSP & Wakil Ketua PP ISEI Bidang II

Pelatihan dan Sertifikasi, Bukan Lagi Opsi
Di era industri yang bergerak cepat, kebutuhan tenaga kerja tidak lagi cukup hanya lulusan sekolah atau perguruan tinggi. Perusahaan mencari keterampilan nyata, bukan sekadar ijazah. Karena itu, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) muncul sebagai garda terdepan untuk menjembatani antara teori pendidikan dengan keterampilan yang diakui pasar.

Bila LPK menjadi ruang pembekalan, LSP memberi stempel pengakuan. Kombinasi keduanya menjadi standar baru yang mulai diadopsi lintas sektor. Tidak berlebihan jika banyak kalangan menilai, penguatan LPK dan LSP adalah jalan pintas untuk menutup kesenjangan keterampilan (skill gap) yang menganga antara dunia pendidikan dan industri.

LPK Terakreditasi: Dari Ruang Kelas ke Pabrik Kompetensi

Di balik labelnya, LPK bukan sekadar lembaga kursus. LPK terakreditasi Disnaker/Kemnaker (Lembaga Akreditasi-LPK) ibarat pabrik kompetensi yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Ambil contoh sektor logistik digital. LPK di bidang ini tidak hanya mengajarkan dasar-dasar manajemen gudang. Mereka menambahkan modul big data analytics, pengelolaan supply chain berbasis teknologi, hingga literasi digital agar lulusannya mampu mengoperasikan perangkat lunak terkini. "Kalau hanya mengandalkan pembelajaran klasik, pekerja kita bisa tertinggal lima sampai sepuluh tahun," ujar seorang instruktur di salah satu LPK logistik di Bekasi.

Proses akreditasi menjadi penting. LPK yang tidak terakreditasi kerap dituding asal buka kelas tanpa standar kurikulum. Dengan akreditasi resmi dari pemerintah, kualitasnya terukur, instruktur diuji, dan fasilitas diperiksa. Artinya, tenaga kerja yang dilatih punya jaminan mutu.

LSP: Stempel Kompetensi yang Kredibel

Namun, pelatihan saja tidak cukup. Dunia industri membutuhkan pengakuan formal. Inilah peran LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam Bab I pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 telah dijelaskan secara terang benderang bahwa BNSP adalah lembaga indenpenden yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari BNSP. Maka LSP hadir memberi jaminan bahwa keterampilan seseorang sahih sesuai standar kompetensi kerja nasional bahkan internasional setelah dilakukan asesmen oleh asesor kompetensi LSP dan asesi dinyatakan telah kompeten dengan pembuktian sertifikasi kompetensi kerja.

Sertifikat LSP bukan sekadar kertas bergambar logo Garuda saja. Namun menjadi paspor atau alat bukti bahwa seseorang telah kompeten terhadap satu keterampilan. Perusahaan lebih percaya merekrut pekerja yang sudah tersertifikasi karena ada kepastian kompetensi. Misalnya, seorang teknisi listrik bersertifikasi yang dikeluarkan BNSP melalui kepanjangan tangannya LSP, tidak hanya tahu memasang kabel, tapi juga paham standar keamanan perlistrikan yang diakui secara nasional karena telah diasesmen sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bahkan Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI).

BNSP memberi lisensi LSP agar setiap uji kompetensi tidak dilakukan sembarangan. Ada sistem, ada skema, ada assessor yang berpengalaman. Mekanisme ini memastikan sertifikasi bukan formalitas, melainkan hasil uji nyata keterampilan.

Sinergi: LPK Melatih, LSP Menguji, Industri Memanen

Idealnya, LPK dan LSP tidak berjalan sendiri-sendiri. LPK menyiapkan tenaga kerja dengan kurikulum berbasis kebutuhan industri, lalu LSP menguji

keterampilannya. Hasilnya, industri tinggal "memanen" pekerja yang siap pakai.

Di lapangan, ada contoh menarik. Sebuah perusahaan manufaktur otomotif di Karawang menjalin kerja sama langsung dengan LPK bidang teknik dan LSP otomotif. LPK memberi pelatihan intensif selama enam bulan, lalu peserta langsung diuji/ diasesmen oleh LSP. Begitu dinyatakan kompeten maka asesi akan memperoleh sertifikasi. Kenapa harus diasesmen oleh LSP, hal ini dilakukan untuk menjaga imparsialitas atau ketidakberpihakan dan menjaga kualitas dan mutu pengajaran dengan pengujian. Serta telah diatur dalam Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PBNSP) 201. Mereka yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikasi bisa langsung direkrut. Skema ini memperpendek rantai perekrutan, sekaligus mengurangi biaya pelatihan internal perusahaan.

Model ini bisa diadopsi lintas sektor: energi baru terbarukan, keamanan siber, pertanian modern, bahkan perbankan digital. Tantangannya tinggal bagaimana memastikan komunikasi tiga arah antara LPK, LSP, dan industri berjalan mulus.

Kesenjangan Keterampilan Masih Menganga

Meski mekanisme sudah jelas, fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan keterampilan masih besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, dari sekitar 137 juta angkatan kerja Indonesia, hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat kompetensi resmi yang dikeluarkan BNSP. Disektor keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan mandatory untuk pekerjaan yang dibutuhkan industri keuangan baik diindustri perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, pengadaian dan Lembaga Jasa keuangan (LJK) lainnya dengan memiliki SKKNI masing-masing sektor di LJK berikut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dirancang untuk menyetarakan dan mengklasifikasi kualifikasi kompetensi yang diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Di sisi lain, dunia industri mengeluhkan minimnya tenaga kerja dengan keterampilan spesifik. "Banyak yang pintar teori, tapi begitu masuk industri tidak bisa operasikan mesin," keluh seorang manajer HR di kawasan industri Cikarang. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa penguatan LPK dan LSP, lulusan pendidikan formal akan terus kesulitan bersaing dengan kebutuhan lapangan kerja yang dinamis.

Standar Kompetensi Baru di Era Digital, Ekonomi Hijau dan Manajemen Resiko

Industri tidak statis. Hari ini butuh operator mesin, besok butuh analis data. Kebutuhan akan sumberdaya manusia kompeten terus bertumbuh. LPK dan LSP harus bergerak cepat merespons. Misalnya, di sektor energi, pelatihan green jobs seperti teknisi panel surya dan instalasi kendaraan listrik sudah mendesak.

LSP juga harus menyiapkan skema sertifikasi baru. Juga halnya Sertifikat profesi bidang keamanan siber atau digital finance kini dicari perusahaan perbankan dan startup teknologi khususnya disektor keuangan. Era digital dan ekonomi hijau terus berkembang sangat cepat, maka satu keniscayaan kompetensi atas itu sangatlah dibutuhkan, namun tidak kalah penting dengan manajemen resiko yang harus dipahami sehingga industry khususnya sektor ekonomi dapat memitigasi resiko, untuk itu perlu adanya SDM yang memiliki kompetensi dibidang manajemen resiko bahkan mulai dari tata Kelola dan kepatuhannya, itu semua ada SKKNI-nya dan ada sertifikasi kompetensinya.

Jika LPK-LSP tidak beradaptasi, Indonesia berisiko menjadi penonton di tengah arus investasi industri masa depan.

Tantangan Integrasi dan Persepsi Publik

Ada masalah klasik: fragmentasi. LPK kadang jalan sendiri tanpa terhubung ke LSP. LSP pun kadang membuat skema uji tanpa sinkron dengan kurikulum pelatihan. Akibatnya, lulusan LPK tidak otomatis tersertifikasi, sementara sertifikasi LSP sering dianggap sekadar formalitas.

Selain itu, persepsi publik masih melihat pelatihan dan sertifikasi sebagai "opsi cadangan" bagi yang gagal kuliah. Padahal di negara maju, vocational training justru jalur utama yang disubsidi negara. Di Jerman, misalnya, pekerja tersertifikasi dari *Berufsschule* justru diburu industri dengan gaji tinggi.

Indonesia perlu mengubah paradigma ini. Bahwa sertifikasi profesi bukan jalan pintas, melainkan jalur resmi menuju kompetensi kelas dunia.

Refleksi ISEI: SDM Sebagai Infrastruktur Ekonomi

Bagi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), isu LPK dan LSP tidak hanya soal tenaga kerja. Namun bagian dari strategi ekonomi. Tenaga kerja kompeten adalah infrastruktur lunak yang sama pentingnya dengan jalan tol atau bandara.

Ekonomi digital, ekonomi hijau, tata kelola, resiko dan kepatuhan hingga industrialisasi manufaktur hanya bisa berkelanjutan jika ada SDM yang benar-benar siap dan kompeten. ISEI berupaya dapat mendorong agar LPK dan LSP masuk dalam kebijakan makro, tidak hanya sebagai program teknis Kementerian Ketenagakerjaan.

Penguatan sistem pelatihan dan sertifikasi adalah investasi jangka panjang. Jika dikelola serius, Indonesia bisa melahirkan bonus demografi yang benar-benar produktif, bukan sekadar statistik.

Dari Formalitas ke Fondasi

Keberadaan LPK dan LSP perlu dilihat sebagai fondasi pembangunan SDM, bukan tambahan kosmetik. LPK melatih keterampilan yang dibutuhkan, LSP mengesahkan kompetensinya, industri memanfaatkan tenaga kerja yang siap pakai.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan sinergi berjalan sistematis, bukan sporadis. Pemerintah harus mendorong kebijakan integratif, industri wajib memberi masukan kurikulum dan standarnisasi, sementara masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap pelatihan dan sertifikasi.

Tanpa itu semua, sertifikasi akan terjebak sebagai formalitas administratif. Namun dengan sinergi yang tepat, LPK dan LSP bisa menjadi pilar kompetensi tenaga kerja Indonesia, sekaligus kunci daya saing bangsa di panggung global, dan Indonesia benar-benar siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045.

Opini

Urgensi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bankir

Oleh **Ir. Reinhard Harianja, MM, SCO, CCM, CACP**
Dosen FEB MET Universitas Atma Jaya Jakarta

Industri perbankan merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank tidak hanya berfungsi menghimpun (funding) dan menyalurkan dana (lending/financing), tetapi juga dituntut untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi perlambatan ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya persaingan di sektor jasa keuangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu daya saing bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 24 Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum menegaskan bahwa SDM adalah aset paling penting yang harus dikelola secara berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam peningkatan kualitas SDM adalah sertifikasi kompetensi kerja yang memastikan bahwa tenaga kerja di sektor perbankan memiliki standar kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Urgensi Pengembangan SDM di Sektor Perbankan

1. **SDM sebagai Aset Strategis.** Perbankan merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, dan kompetensi SDM menjadi kunci dalam menjaga reputasi serta kredibilitas bank.
2. **Respon terhadap Transformasi Digital.** Perubahan perilaku nasabah mendorong perbankan beradaptasi dengan layanan berbasis digital. OJK melalui POJK No. 21 Tahun 2023 Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum, menekankan perlunya kualitas SDM yang mampu mengelola risiko digital, keamanan siber, serta inovasi layanan perbankan berbasis teknologi.
3. **Daya Saing Global.** Integrasi sistem keuangan global menuntut SDM perbankan di Indonesia memiliki kualitas yang setara dengan standar internasional.

Sertifikasi Kompetensi Kerja: Instrumen Penguatan SDM

Sertifikasi kompetensi kerja merupakan proses penilaian formal terhadap keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja seorang SDM sesuai standar kompetensi yang berlaku. Standar Kompetensi kerja berbagai bidang di perbankan didasari oleh Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 218 tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020 mengatur tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktifitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan. Sementara persyaratan kompetensi diatur masing-masing oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSP-Perbankan) Bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Skema Sertifikasi KKNI untuk masing-masing jenjang kualifikasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK no. Kep-18/D.02/2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan. Khusus KKNI bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) diatur bersama antara BNSP dan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas system pembayaran di Indonesia.

Berdasarkan Skema KKNI dan SKKNI tersebut, LSP-Perbankan melalui Asesornya dapat melakukan uji kompetensi terhadap bankir (asesi) yang mengajukan permohonan uji kompetensi.

Di sektor perbankan, sertifikasi ini mencakup berbagai bidang seperti manajemen risiko, kepatuhan, teknologi informasi, keamanan siber, wealth management, audit, dan treasury. OJK mewajibkan bank mengikutsertakan SDM pada program sertifikasi, terutama pada jabatan kritikal seperti direksi, pejabat eksekutif, dan fungsi pengawasan.

Masa berlalu sertifikasi kompetensi dibatasi 3 (tiga) tahun. Setelah pegawai dan/atau pejabat Bank dinyatakan kompeten di bidangnya, pemegang sertifikasi wajib mengikuti program pemeliharaan kompetensi setiap tahun selama 3 (tiga) tahun, dalam bentuk in-house training, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, workshop, lokakarya, e-learning dan/atau portfolio pekerjaan sesuai dengan bidang sertifikasi kompetensi kerja tersebut. Program pemeliharaan ini menjadi salah 1 (satu) syarat untuk perpanjangan (resertifikasi) sertifikasi kompetensi kerja. Kewajiban Bank dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.

1. Menyediakan Dana Pengembangan SDM minimal 3,5% dari total beban gaji kotor tahun sebelumnya.
2. Memiliki Rencana dan Laporan Pengembangan SDM dalam rencana bisnis tahunan.
3. Mengikutsertakan SDM pada Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk fungsi dan jabatan kritikal. Jabatan kritikal merupakan jabatan pada Bank yang melaksanakan fungsi kritikal, antara lain, Direksi; Dewan Komisaris (Dekom); Komite

yang membantu Dekom; Pejabat eksekutif dan Pejabat selain Pejabat eksekutif yang menduduki jabatan kritikal pada Bank. Fungsi kritikal merupakan fungsi inti pada Bank yang terkait dengan aktifitas bisnis, layanan dan operasional yang memiliki peran utama dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran yang sesuai dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

4. Melakukan Pemeliharaan Kompetensi secara berkala.

Manfaat Sertifikasi Kompetensi bagi Bank dan SDM:

1. Meningkatkan kredibilitas dan reputasi Bank.
2. Mendorong efisiensi dan produktivitas.
3. Mitigasi risiko operasional dan kepatuhan.
4. Pengembangan karier SDM.
5. Kesiapan menghadapi disrupsi digital.

Tantangan Perbankan

Perkembangan inovasi teknologi informasi dalam layanan keuangan digital, memberikan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh Bank. Selain peluang bisnis, transformasi digital juga melahirkan tantangan maupun risiko yang perlu diantisipasi oleh perbankan. Tantangan yang bisa dihadapi perbankan, antara lain: risiko kebocoran data (*data leak*), risiko terkait investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko terjadinya kesalahfahaman dalam kerja sama dengan Pihak ketiga, risiko terkait penyalahgunaan teknologi baru maupun risiko terkait keamanan siber (*cyber security*) seperti phishing dan social engineering. Dalam hal ini, kompetensi kerja di bidang manajemen risiko bagi Pengurus/Pengawas dan Pejabat serta karyawan Bank menjadi suatu keniscayaan.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi kompetensi kerja di sektor perbankan antara lain keterbatasan anggaran, resistensi karyawan, kapasitas Lembaga Sertifikasi Perbankan (LSP) yang terbatas, dan perlunya pembaharuan standar kompetensi sesuai perkembangan kompeksitas bisnis perbankan.

Dengan peningkatan kompetensi di bidang manajemen risiko bagi Bankir tersebut di atas, belum tentu dapat menihilkan risiko inheren yang dihadapi Bank karena masih ada aspek lain yang perlu mendapat perhatian seperti integritas Bankir untuk mencegah terjadinya fraud atau korupsi dan perkembangan kejahatan siber (Cyber crime) yang semakin bervariasi dan meningkat dalam bentuk *malware*; *phishing*; *social engineering* dan sebagainya. Misalnya saja, beberapa Bank baru-baru ini menghadapi SMS Masking dengan penggunaan Base Transceiver Station (BTS) palsu milik Telco oleh Pelaku. SMS Masking adalah fitur teknologi pengiriman sms broadcast di mana identitas pengirim yang muncul pada layar *gadget* korban dapat diubah sesuai keinginan si pelaku seperti mengatasnamakan suatu Perusahaan atau Bank, instansi atau produk dengan menggunakan Base Transceiver Station (BTS) palsu. Banyak laporan dari korban kepada *Call center* Bank karena dana mereka tiba-tiba dikuras oleh si Pelaku tanpa transaksi penarikan dana yang dilakukan nasabah melalui respon kepada SMS Masking karena menyakini notifikasi via sms tersebut berasal dari Bank.

Peningkatan kompleksitas risiko yang dihadapi perbankan seiring dengan perkembangan bisnis digital perbankan, mau tidak mau menuntut SDM Perbankan harus meningkatkan kompetensinya melalui *upskilling* dan memiliki kompetensi yang baru melalui reskilling. Calon-calon bankir memasuki perbankan dengan gelar akademis seperti S1 dan S2. Setelah bekerja di Bank, gelar akademis tersebut dipandang tidak cukup lagi dan harus dilengkapi dengan penguasaan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi. Kalau tidak, bankir-bankir tersebut harus "check out" dari jabatannya dan digantikan oleh SDM yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini, setiap Bank harus memiliki kebijakan job-person match untuk setiap jabatan (job title) guna mengevaluasi kesesesuaian antara kompetensi jabatan dan kompetensi diri. Peta kompetensi bankir diperlihatkan oleh bagan di bawah ini:

Kesimpulan

Pengembangan kualitas SDM melalui sertifikasi kompetensi kerja merupakan kebutuhan mendesak bagi industri perbankan di Indonesia. Regulasi OJK telah memberikan landasan hukum yang kuat dengan mewajibkan bank mengalokasikan anggaran, menyusun rencana pengembangan SDM, serta memastikan jabatan kritikal diisi oleh tenaga kerja yang tersertifikasi (*certified*). Di tengah transformasi digital dan meningkatnya kompleksitas risiko, sertifikasi kompetensi kerja harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi bank dan SDM yang terlibat.

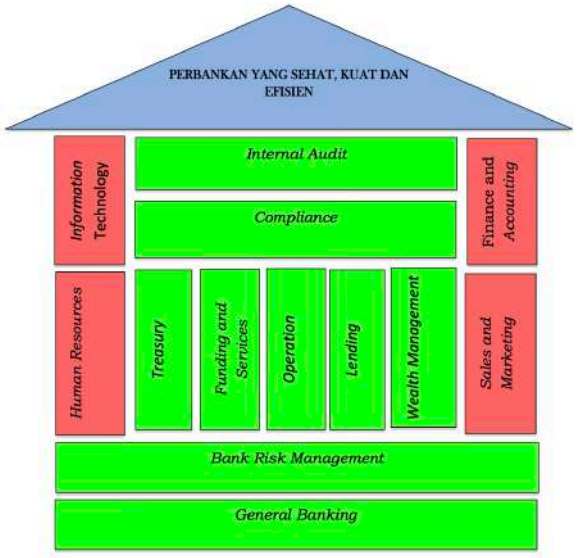

Gambar No. 1. Peta Profesi Bankir

"There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning"

-Jiddu Krishnamurti-

Opini

Menciptakan Pendidikan Unggul

Oleh **Robert Larson Nehe**
Mahasiswa Prodi MET UAJY/Guru SMAK IPEKA Pluit

Berawal dari sebuah rasa, manusia terdorong untuk memahami apa yang ia alami. Rasa tersebut tumbuh menjadi tanya, yang kemudian memicu pencarian makna. Proses inilah yang melahirkan berbagai bentuk karya sebagai perwujudan dari rasa ingin tahu, yang merupakan sifat alami manusia. Melalui pancaindra, manusia mengenali dan merespons lingkungan, lalu mengolah informasi yang diterima dengan akal untuk mencipta dan berinovasi. Inilah yang menandai dimulainya proses belajar, sebagai jalur pengembangan diri, penyesuaian dengan zaman, dan sarana memahami kehidupan secara lebih bermakna.

Seiring dengan berkembangnya peradaban, pendidikan pun berubah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia bukan lagi aktivitas individual yang kontemplatif, tetapi menjadi proses sosial yang melibatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Dalam konteks modern, pendidikan bahkan menjadi indikator penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia kerja hingga kepemimpinan publik. Pendidikan telah menjadi salah satu penentu utama peningkatan standar hidup. Oleh sebab itu, masyarakat berlomba-lomba mengakses pendidikan terbaik, menjadikannya sebagai investasi penting untuk masa depan.

Namun, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas dan pemerataan pendidikan. Berdasarkan laporan OECD melalui *Program for Internasional Student Assessment* (PISA) tahun 2022, skor rata-rata siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara OECD. Dalam literasi matematika, skor Indonesia adalah 366 dari 472; dalam membaca, 359 dari 476; dan dalam sains, 383 dari 485. Ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa Indonesia belum mencapai kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan nyata.
Lebih jauh, hanya 18% siswa Indonesia yang mencapai level kemahiran minimal (level 2) dalam matematika, sedangkan rata-rata OECD berada pada angka 69%. Hampir tidak ada siswa Indonesia yang mencapai level 5 atau 6, yang menandakan minimnya siswa berprestasi tinggi dalam bidang ini. Sementara itu, sekitar 12% siswa di Indonesia pernah mengulang kelas, lebih tinggi dari rata-rata OECD sebesar 9%. Kondisi ini menandakan adanya permasalahan struktural dalam sistem pendidikan nasional, yang tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga metode dan pendekatan belajar.

Kenyataan ini mendorong banyak orang tua untuk mencari sekolah yang dianggap memiliki reputasi unggul. Dalam praktiknya, predikat "sekolah unggulan" sering kali disematkan berdasarkan persepsi masyarakat yang belum tentu selaras dengan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Pemerintah Indonesia bahkan telah mencabut penggunaan label seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) guna mencegah ketimpangan akses dan komersialisasi pendidikan. Namun, stigma terhadap sekolah unggulan masih melekat dan menjadi penentu utama dalam pemilihan institusi pendidikan.

Padahal, menurut berbagai kajian, sekolah dengan pendidikan unggul bukan hanya ditentukan oleh fasilitas fisik semata. Sekolah yang baik memiliki karakteristik seperti penerimaan siswa berdasarkan prestasi akademik, fasilitas pembelajaran yang fungsional, stabilitas tenaga pengajar, dan relasi yang sehat antara guru, kepala sekolah, serta orang tua. Namun demikian, dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya, tidak semua sekolah mampu memenuhi standar ini. Maka dari itu, penting untuk menekankan bahwa esensi pendidikan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar label "unggul" secara formalitas.

Inti dari pendidikan adalah kemampuan peserta didik untuk merasakan, bertanya, dan berkarya. Ketiga proses ini membentuk fondasi bagi lahirnya manusia-manusia pembelajar yang mandiri, kritis, dan inovatif. Sekolah, apa pun kondisinya, seharusnya mampu membangun ruang-ruang pembelajaran yang menumbuhkan ketiga kemampuan tersebut. Keunggulan pendidikan terletak pada daya dorong internal untuk memahami lingkungan, memecahkan masalah, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan pada gedung megah atau kelengkapan alat peraga semata.

Proses ini juga menjadi fondasi bagi pengembangan human capital. Dalam konteks PISA, human capital tidak hanya diukur dari nilai akademis, tetapi juga dari kemampuan menyerap informasi, berpikir logis, beradaptasi dengan perubahan, serta menyelesaikan persoalan kompleks. Sayangnya, rendahnya skor PISA Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan human capital nasional masih lemah. Ini berdampak langsung pada daya saing tenaga kerja Indonesia, terutama di pasar global yang semakin kompetitif dan berbasis keterampilan kompleks.
Sebagai contoh, banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau minat mereka. Hal ini tidak hanya mengurangi produktivitas kerja, tetapi juga berdampak pada rendahnya kepuasan profesional dan meningkatnya angka pengangguran terselubung. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pembenahan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kecocokan antara potensi individu dengan pilihan karier.
Jika sejak dini peserta didik telah dilatih untuk mengenal diri, berpikir secara reflektif, dan menyelesaikan persoalan secara mandiri, maka saat memasuki dunia kerja mereka akan tumbuh sebagai pribadi yang tangguh dan adaptif. Mereka tidak akan bergantung pada instruksi, tetapi aktif menawarkan solusi. Mereka tidak pasif menunggu fasilitas tersedia, tetapi justru mampu menciptakan alternatif dari keterbatasan. Inilah bentuk nyata dari kesiapan human capital, kemampuan untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mengubahnya.
Akhirnya, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan human capital unggul, dibutuhkan perubahan paradigma. Pendidikan harus kembali pada esensinya: membentuk manusia utuh yang mampu berpikir, merasa, dan bertindak. Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi nyata. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya mampu menjawab tantangan masa depan, tetapi juga memimpin perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.

Sinopsis Buku

PELAJARAN BAIK
Dari Pendidikan Tinggi Malaysia

Oleh **Prof. Dr. Muhammad Firdaus**
Pengurus Pusat ISEI Bidang V, Guru Besar Universitas IPB &
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Kuala Lumpur

Pelajaran Baik dari Pendidikan Tinggi Malaysia adalah buku yang disusun oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. Buku ini diterbitkan oleh IPB Press pada tahun 2025. Buku ini baik di konsumsi oleh pengambil kebijakan, pemerhati pendidikan, civitas akademika perguruan tinggi serta khalayak ramai seperti siswa sekolah dan orang tua.

Buku ini mengupas sejarah, kebijakan dan kondisi daya saing penididikan tinggi Malaysia, yang telah berhasil membawa berbagai universitas di negeri jiran mempunyai reputasi yang sangat membanggakan di kancah internasional. Dalam buku ini juga diuraikan bagaimana pengalaman Malaysia dalam menarik ratusan ribu mahasiswa asing dari berbagai negara di berbagai penjuru dunia untuk bersedia kuliah di berbagai jenjang mulai sarjana sampai tingkat doktor. Indonesia merupakan negara kedua yang mengirimkan pelajar untuk meneruskan pendidikan tinggi ke Malaysia, setelah China yang masih mendominasi hingga saat ini.

Pada bab awal buku ini disampaikan perkembangan kebijakan liberalisasi terhadap perguruan tinggi asing di Malaysia. Di Malaysia tingginya jumlah mahasiswa asing termasuk dari Indonesia karena banyaknya universitas dari Inggris, Australia, China yang sudah beroperasi lebih dari dua puluh lima tahun silam. Universitas yang mempunyai reputasi cemerlang di izinkan mengembangkan sayapnya di negeri jiran. Di Indonesia keran sektor jasa pendidikan tinggi sudah mulai dibuka, yang tentunya menimbulkan pro kontra, terutama dipandang dapat menjadi ancaman bagi univeritas di dalam negeri, khususnya PTS yang dapat beroperasi jika jumlah mahasiswa dapat memenuhi skala penghematan ekonomi (*economies of scale*). Padahal universitas asing adalah "substitusi dekat" bagi mahasiswa PTS unggulan seperti UPH, Binus, President University, UMM dan lainnya yang sudah sangat baik reputasinya di dalam negeri dan mulai dikenal di mancanegara. Mahasiswa Indonesia yang memilih kuliah di univeristas asing di dalam negeri membantu penghematan devisa, karena belajar dari sudut pandang dari Pemerintah Malaysia: mahasiswa asing adalah turis/wisatawan selama mereka menuntut ilmu.

Dalam buku ini banyak diuraikan kebijakan yang diambil Pemerintah Malaysia dalam pengembangan pendidikan tinggi. Jika dulu pada era 1970 atau 1980-an banyak orang Malaysia yang berdatangan untuk kuliah di Indonesia, maka sejak 1990-an terjadi situasi yang berkebalikan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan Malaysia dalam menarik mahasiswa asing adalah upaya promosi yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. *Education Malaysia Global Services* (EMGS) yang merupakan institusi semi Pemerintah di bawah arahan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia tidak semata-mata mengelola visa pelajar, namun bertanggung jawab secara operasional untuk internasionalisasi bersama universitas baik publik maupun swasta yang ada di Malaysia. Pengelolaan dana visa pelajar ini sekaligus pula menunjukkan berjalannya koordinasi antar lembaga Pemerintah, yang merupakan barang mahal di Indonesia.

Pada bagian daya saing, dalam buku ini disandingkan reputasi universalitas Malaysia dan Indonesia. Dari sisi rangking global, baik daei pemeringkatan QS maupun THE, perguruan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal di bandingkan Malaysia. Publikasi, dosen dan mahasiswa, kerjasama riset dan mahasiswa internasional adalah beberapa aspek yang mengangkat posisi berbagai universitas Malaysia. Pada bagian lampiran, disampaikan profil beberapa universitas Malaysia, yang memberikan pelajaran antara lain setiap universitas memiliki kompetensi unggulan yang banyaknya berbeda antar universitas. Beberapa bidang ilmu seperti *hospitality*, *traditional China medicine*, ekonomi dan hukum syariah, menjadi pengungkit universitas Malaysia di kancah global. Pengalaman dan kesan dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di delapan belas universitas Malaysia juga menjadi bagian pada lampiran yang menarik dari buku ini, menjadi bukti kebanggaan terhadap pilihan berbagai bidang ilmu tersebut.

Sebagai pelajaran baik, buku ini diakhiri dengan berbagai rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di universitas Indonesia. Ada lima rekomendasi yang disampaikan, yang tentunya sebagian daripadanya sudah dilaksanakan di Indonesia namun tentu perlu didorong lebih jauh. Saran untuk membuka akses yang lebih luas bagi perguruan tinggi asing, mengadopsi kurikulum yang lebih fleksibel, membentuk badan khusus untuk menangani mahasiswa asing, menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kuliah serta meningkatkan reputasi akademik secara lebih serius. Tentunya kami tidak pantas untuk menggurui, namun lukusan mahasiswa yang lebih cepat dan mudah diterima industri, menjadi pelajaran berharga untuk masa depan Pendidikan Tinggi Indonesia.

LAMEMBA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

Berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia

Member of

INQAAHE
Full Member

apqn
ASIA-PACIFIC QUALITY NETWORK

In cooperation with

AACSB
Business Education.
Connected.

lamemba.or.id

lamemba.id

lamemba

lamemba

Soemitronomics 2025: **Mewujudkan Ekonomi Indonesia yang Tangguh dan Inklusif di Sulawesi Utara**

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan **Seminar Nasional**, yang mengangkat tema **"Soemitronomics 2025: Mewujudkan Ekonomi Indonesia yang Tangguh dan Inklusif di Sulawesi Utara"**

Kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan 108 tahun **Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Bapak Ilmu Ekonomi Indonesia,** yang dikenal dengan gagasan Soemitronomics—suatu pendekatan ekonomi yang memadukan nilai kebangsaan, pemerataan sosial, dan pragmatisme pembangunan.

Acara ini dibuka oleh Dr. Joy Elly Tulung selaku Ketua ISEI Cabang Manado dan disampaikan sambutan oleh Bapak Joko Supratikto selaku Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Keynote speaker dalam kegiatan ini juga disampaikan oleh Bapak Burhanudin Abdullah selaku Ketua Dewan Penasehat ISEI dan Bapak Reza Dotulong selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara.

"Pemikiran Soemitro tetap relevan hingga kini: negara harus hadir aktif untuk mengoreksi ketimpangan struktural, membangun kemandirian ekonomi, sekaligus menciptakan kesejahteraan bersama," ujar Dr. Harryadin Mahardika, Ketua Panitia Soemitro Economic Forum. Kegiatan ini menekankan pentingnya **kolaborasi pentahelix** antara pemerintah, dunia usaha, komunitas lokal, akademisi, dan media dalam mendorong Ekonomi Pancasila yang demokratis dan berkelanjutan.

ISEI Manado Award 2025 turut diberikan kepada tokoh dan institusi yang berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara.

Pemikiran Soemitro mengenai **ekonomi pembangunan, industrialisasi nasional, nasionalisme ekonomi, dan peran strategis negara** terbukti semakin relevan di era pasca-pandemi, disrupsi rantai pasok, hingga krisis iklim global.

Dengan semangat peringatan 108 tahun Prof. Soemitro, ISEI menegaskan kembali komitmennya:

"Pariwisata Sulut yang tangguh, ekonomi lokal yang berdaya saing, dan pemerataan kesejahteraan adalah jalan menuju Indonesia Emas 2045."

Joy Elly Tulung
Ketua ISEI Cabang Manado
Koordinator Sulawesi Utara

Kegiatan ISEI

Universitas Sebelas Maret (UNS): **Mangesthi Luhur Ambangun Nagara – Advancing Human Society, Preserving Noble Values**

Oleh **Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.**
Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Internasionalisasi dan Informasi UNS & Pengurus Pusat ISEI Bidang V

Universitas Sebelas Maret (UNS), perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) yang berlokasi di Kota Surakarta yang lahir pada tahun 1976, berkomitmen untuk menjadikan visi nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" sebagai pijakan dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Visi tersebut sejalan dengan semboyan UNS yaitu **"Mangesti Luhur Ambangun Nagara",** yang merefleksikan tekad UNS untuk berperan aktif dalam membangun bangsa dan peradaban melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul dan berdaya saing global dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai nilai luhur budaya bangsa sebagai pondasi moral, budaya dan intelektual. Dalam Bahasa Inggris, semboyan tersebut secara luas kami translasikan menjadi suatu tagline *"advancing human society, preserving noble values".* Secara eksplisit, cita-cita tersebut juga tertuliskan ke dalam Visi UNS, yaitu "menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional."

Untuk mewujudkan visi tersebut, UNS telah menyusun rencana strategis 2024-2029 yang terdiri dari sembilan program utama yang disingkat menjadi **DREAMTEAM** yaitu sebagai berikut:

1. **D**igital, yaitu meredesain tata kelola UNS menjadi lebih adaptif, memiliki agilitas yang tinggi, transparan dan berbasis teknologi
2. **R**esearch, yaitu mengakselerasi kualitas riset yang memiliki dampak tinggi dan menghasilkan inovasi yang berkontribusi nyata dalam pemecahan masalah di masyarakat dan bangsa.
3. **E**ducation, yaitu meningkatkan relevansi dan mutu layanan pendidikan melalui optimalisasi teknologi informasi
4. **A**utonomous, yaitu mengakselerasi kemandirian UNS melalui optimalisasi sumber daya dan layanan eksternal
5. **M**odern, yaitu menambah, memodernisasi, dan meremajakan sarana dan prasarana pembelajaran serta riset
6. **T**ogether, yaitu memperkuat sinergisitas antar individu, organ, dan pemangku kepentingan di UNS
7. **E**quilibrium, yaitu mengembangkan budaya lokal dan nasional serta mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai pilar dalam harmonisasi pengelolaan UNS
8. **A**ctive, yaitu melakukan kolaborasi aktif baik dalam bentuk triple helix, quadruple helix maupun pentahelix, dan
9. **M**anpower, yaitu mengakselerasi kualitas sumber daya manusia sebagai modal strategis dalam penguatan layanan pendidikan dan riset.

Rencana strategis tersebut disusun sebagai kerangka kerja komprehensif, sistematis, dan terukur yang berfungsi sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNS dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Kerangka DREAMTEAM ini tidak hanya diarahkan untuk mengakselerasi daya saing UNS secara nasional dan global, namun juga memastikan relevansi lokal melalui pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.
UNS menunjukkan progresifitas yang baik dalam beberapa waktu terakhir dalam konteks pencapaian indikator kinerja. Sebagai contoh, pada tahun 2024–2025, UNS telah mencatatkan peningkatan signifikan dalam berbagai pemeringkatan global. Sebagai contoh, pada QS Asia Rankings 2025, UNS berhasil naik 80 peringkat dari posisi 301–350 menjadi peringkat 221, capaian tertinggi sepanjang sejarah UNS. Pada pemeringkatan Applied-HE, UNS menempati posisi pertama perguruan tinggi negeri di Indonesia dan peringkat ke-4 di Asia Tenggara, meningkat tajam dari peringkat ke-10 nasional dan ke-32 regional pada tahun sebelumnya. Dalam konteks spesifik disiplin ilmu, dalam Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025, UNS masuk di 9 dari 11 bidang disiplin ilmu, dimana untuk disiplin ilmu Hukum menempati peringkat 201–250 dunia sekaligus peringkat pertama di Indonesia. Selain itu, dalam QS World University Rankings by Subject 2025, terdapat 5 bidang ilmu yang UNS masuk di dalam nya yaitu *Economics and Econometrics* (301-350 dunia), *Accounting and Finance* (301-375 dunia), *Agriculture and Forestry* (401-475 dunia), *Art and Humanities* (501-550 dunia) dan *Business and Management Studies* (601-650 dunia).

Dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional, UNS berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan peradaban umat manusia sebagaimana tercermin dalam semboyan Mangesthi Luhur Ambangun Nagara – *Advancing Human Society, Preserving Noble Values.*

Pengurus ISEI Cabang Medan Resmi Dilantik

Ketua Bidang II PP ISEI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T, M.Si, M.Eng, Ph.D melantik pengurus ISEI Cabang Medan Koordinator Sumatera Utara Periode 2025-2028 bertempat di Aula Prof.Dr.Suhadi Hadibroto Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Medan, Kamis 21 Agustus 2025. Dalam kata sambutannya Amalia Adininggar Widyasanti mengharapkan pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing yang telah ditetapkan yakni bidang pengembangan organisasi dan kerjasama, bidang riset dan inovasi, bidang kebijakan ekonomi, moneter dan publik, bidang pengembangan akademik dan profesi, sertifikasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu **Ketua terpilih Dr. Paidi, S.E., M.Si.** menyatakan akan berupaya menjadikan ISEI sebagai ruangan strategis sinergi antar akademisi, pelaku usaha dan pemerintahan serta mendorong ISEI sebagai katalisator dalam menghasilkan "policy brief" strategis, inovasi pembangunan daerah dan turut serta menyukseskan agenda besar Indonesia Emas 2045. Bersamaan dengan acara pelantikan, **Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti** juga menyampaikan kuliah umum dengan topik **Di Balik Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen** dihadapan para anggota ISEI, sivitas akademika 24 perguruan tinggi se Kota Medan dan Kepala BPS Kabupaten/ Kota yang keseluruhan peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 300 orang peserta. Dalam kuliah umumnya Kepala BPS menyampaikan bahwa **BPS adalah lembaga yang melakukan perhitungan sesuai data yang dikumpulkan di lapangan bukan dengan melakukan proyeksi, jadi menghitung, mengukur (pertumbuhan ekonomi) itu berbeda dengan melakukan proyeksi** Turut hadir dalam acara pelantikan dan kuliah umum Wakil Rektor III USU, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, para Dekan Fakultas Ekonomi, perwakilan Bank Indonesia, OJK, LPS, Kadin, Hipmi, Koordinator ISEI wilayah Barat dan Sekretaris Eksekutif PP ISEI.

Firman Sihol Parningotan
Sekretaris Eksekutif PP ISEI

Kegiatan ISEI

Pelantikan ISEI Manado: **Menyongsong Sidang Pleno XXIV dan Seminar Nasional ISEI 2025**

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado secara resmi melantik kepengurusan baru dengan jumlah anggota sekitar 150 orang yang berasal dari kalangan akademisi, profesional, pelaku usaha, dan birokrat. Kepengurusan ini akan diketuai oleh **Bapak Joy Elly Tulung,** seorang tokoh ekonomi Sulawesi Utara yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan pendidikan dan ekonomi daerah.

Pelantikan dipimpin langsung oleh **Dr. Solikin M. Juhro,** Sekretaris Umum Pengurus Pusat ISEI sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Moneter Bank Indonesia (DKMP BI). Kehadiran beliau menegaskan komitmen ISEI sebagai organisasi yang menjembatani pemikiran akademik, dunia usaha, dan kebijakan publik demi kemajuan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Dr. Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa ISEI adalah wadah strategis untuk membangun kolaborasi lintas sektor. "ISEI tidak hanya berperan dalam kajian akademik, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pelantikan pengurus ISEI Manado hari ini menandai langkah penting untuk memperkuat peran tersebut di Sulawesi Utara," ungkapnya.

Kepengurusan baru ISEI Manado diharapkan dapat mendorong sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pembuat kebijakan di daerah. Dengan lebih dari 150 anggota, kepengurusan ini mencerminkan representasi berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi Sulawesi Utara.

Bapak Joy Elly Tulung menegaskan, "ISEI Manado akan menjadi wadah dialog produktif untuk menjawab tantangan ekonomi daerah, termasuk diversifikasi sumber pertumbuhan, pengembangan UMKM, pariwisata, dan hilirisasi industri. Kami siap bergerak bersama demi ekonomi Sulawesi Utara yang lebih tangguh dan berdaya saing."

Rangkaian pelantikan ini juga dirangkai dengan **Diseminasi Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran (DKMP BI)** yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Diseminasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para ekonom, praktisi, dan mahasiswa mengenai arah kebijakan moneter nasional, termasuk strategi BI dalam menjaga stabilitas inflasi, stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui forum ini, peserta mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana kebijakan moneter berperan dalam menghadapi dinamika global, termasuk gejolak harga komoditas, perubahan suku bunga internasional, dan perkembangan digitalisasi ekonomi.

Sebagai bagian dari dinamika organisasi nasional, ISEI Manado juga menyatakan kesiapannya untuk **menyambut Sidang Pleno XXIV dan Seminar Nasional ISEI 2025** yang akan menjadi momentum penting bagi konsolidasi gagasan dan kontribusi ISEI terhadap pembangunan ekonomi nasional.

"Kami percaya bahwa Sidang Pleno dan Seminar Nasional ISEI 2025 akan menjadi ajang strategis untuk memperkuat jejaring akademisi, dunia usaha, dan pembuat kebijakan. ISEI Manado siap berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam forum ini," tutur Joy Elly Tulung.

Pelantikan ISEI Manado dan diseminasi DKMP BI ini menjadi bukti nyata komitmen ISEI sebagai think tank ekonomi nasional yang terus mengawal arah pembangunan. Dengan kepengurusan baru yang solid, dukungan Bank Indonesia, serta semangat kolaborasi, ISEI Manado optimis mampu menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan dan inisiatif strategis yang membawa manfaat luas bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya.

Jonathan Ersten Herawan
Analis PP ISEI

Pelantikan ISEI Bandung

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) secara resmi melantik Pengurus ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat, sebuah momentum penting yang menandai komitmen ISEI dalam memperkuat peran strategis para ekonom di daerah sebagai mitra pembangunan nasional.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc., Wakil Ketua I Pengurus Pusat ISEI sekaligus Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam kapasitasnya, Prof. Anggito menegaskan bahwa ISEI bukan hanya organisasi akademik, melainkan juga wadah strategis yang menjembatani pemikiran akademisi, kepentingan dunia usaha, dan kebijakan publik demi tercapainya kesejahteraan ekonomi nasional.

"ISEI harus terus menjaga relevansinya sebagai rumah besar para ekonom Indonesia. Melalui ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat, kita berharap lahir lebih banyak gagasan inovatif yang mendorong daya saing, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi daerah sekaligus nasional," ujar Prof. Anggito dalam sambutannya.

Kepengurusan baru ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat kembali diketuai oleh Prof. Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, CSP, seorang akademisi sekaligus praktisi ekonomi yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan ekonomi regional dan pendidikan tinggi.

Prof. Martha menegaskan, **"ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat akan menjadi katalisator lahirnya ide-ide segar yang relevan dengan dinamika global dan kebutuhan lokal. Kami berkomitmen untuk membangun forum ekonomi yang inklusif, akademis, namun juga aplikatif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas."**

Jawa Barat merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Keberadaan ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat menjadi sangat strategis dalam memastikan potensi daerah ini dapat dikembangkan secara optimal, dengan memperhatikan aspek pemerataan, inovasi, dan keberlanjutan.

Dengan kepengurusan baru, ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat siap berperan sebagai jembatan antara kampus, dunia usaha, dan pemerintah. Forum-forum akademik, seminar, riset bersama, hingga advokasi kebijakan akan menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan ekonomi modern, mulai dari digitalisasi, ketahanan pangan, hingga transisi energi hijau.

Pelantikan ini menandai babak baru bagi ISEI di wilayah Jawa Barat. Dengan dukungan Pengurus Pusat ISEI, kehadiran Prof. Anggito Abimanyu sebagai pemimpin pelantikan, serta kepemimpinan Prof. Martha Fani Cahyandito, ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat optimis akan menjadi motor penggerak lahirnya gagasan ekonomi kerakyatan yang progresif, adaptif, dan kontributif.
"ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat siap menjadi lokomotif pemikiran ekonomi daerah yang bersinergi dengan agenda pembangunan nasional, serta berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tegas Prof. Martha.

Suswanto
Staff Sekretariat PP ISEI

WARTA ISEI
EDISI OKTOBER

Warta ISEI merupakan publikasi yang membahas fenomena atau isu hangat, penting, dan perkembangan terkini yang ditulis dalam karya tulis populer.

Ketentuan Naskah

- Berisi 800-1.000 kata.
- Menggunakan pedoman PUEBI.
- Berbentuk dokumen word dengan font Tahoma, size 12, single-spaced pada kertas bentuk A4 dengan margin halaman 3 cm.
- Dapat melampirkan gambar yang terkait dengan konten naskah.

Tema Naskah

"Ekonomi Kreatif Sebagai New Engine of Growth"

Pengiriman Naskah

warta@isei.or.id

Deadline: 15 Oktober 2025

Template Naskah

bit.ly/publikasiwartaISEI

Tertarik Beriklan di Warta ISEI?

bit.ly/MediaOrderWartaISEI

Contact Person

+62 821-1273-4541 (Firman S.P.)

@ppisei_official

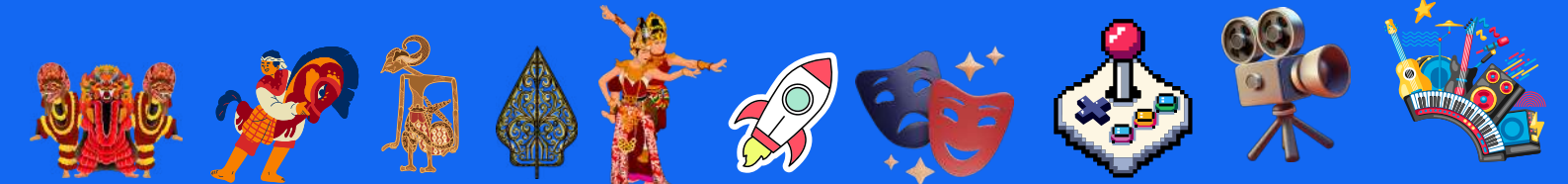

WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Volume 2 No. 4 | Agustus 2025

IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI
Jl. Daksa IV No. 9, Jakarta 12110
Telp : (021) 2277 2577
Fax : (021) 720 1812
E-mail : isei.pusat@gmail.com

ppisei_official PP ISEI isei.or.id